



**DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL  
YANG DILAKUKAN OLEH PENSIUNAN PNS  
DI KABUPATEN MADIUN**

***SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF INFORMAL SECTOR EMPLOYMENT BY  
CIVIL SERVANT PENSIONERS IN MADIUN REGENCY***

Oleh

**Diah Liliana Retno Ariandani  
NIM 120910301003**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL  
YANG DILAKUKAN OLEH PENSIUNAN PNS  
DI KABUPATEN MADIUN**

***SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF INFORMAL SECTOR EMPLOYMENT BY  
CIVIL SERVANT PENSIONERS IN MADIUN REGENCY***

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Diah Liliana Retno Ariandani  
NIM 120910301003**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

1. Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua, Ayahku dan Ibuku yang tercinta, yang telah memberikan curahan kasih sayang dan bimbingan doa demi keberhasilanku, serta dukungan atas setiap langkahku untuk menjadi pribadi yang berilmu dan berbudi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب (٧)  
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب (٨)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,5-8)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2000. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Diah Liliana Retno Ariandani

NIM : 120910301003

jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi dari Pekerjaan Sektor Informal yang Dilakukan Oleh Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkannya sumber dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 20 September 2016

Yang menyatakan,

Diah Liliana Retno Ariandani

NIM 120910301003

**SKRIPSI**

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL  
YANG DILAKUKAN OLEH PENSIUNAN PNS  
DI KABUPATEN MADIUN**

oleh

Diah Liliana Retno Ariandani  
NIM 120910301003

Dosen Pembimbing Utama

Akhmad Munif Mubarak, S.Sos, M.Si.  
NRP 760014660

**PENGESAHAN**

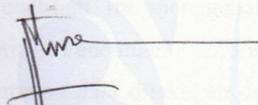
Skripsi berjudul “Dampak Sosial Ekonomi dari Pekerjaan Sektor Informal yang Dilakukan Oleh Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun ” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 29 September 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

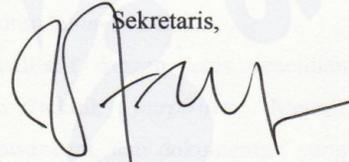
Tim Penguji:

Ketua,



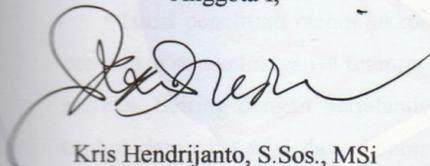
Drs. Partono, M.Si.  
NIP 195608051986031003

Sekretaris,



Akhmad Munif Mubarak, S.Sos., M.Si.  
NRP 760014660

Anggota I,



Kris Hendrijanto, S.Sos., MSi  
NIP 197001031998021001

Anggota II,



Drs. Syech Hariyono, M.Si  
NIP 195904151989021001

Mengesahkan  
Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si.  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Dampak Sosial Ekonomi dari Pekerjaan Sektor Informal yang Dilakukan Oleh Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun;** Diah Liliana Retno Ariandani, 120910301003; 2016: 147 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pekerjaan informal sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan pensiunan PNS di Kabupaten Madiun. Selain itu penelitian ini juga membahas dampak yang ada ketika berjalannya pekerjaan informal yang dilakukan oleh pensiunan PNS Kabupaten Madiun tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama tiga minggu. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pekerjaan informal yang dilakukan oleh pensiunan dan keluarganya mampu meningkatkan dan merubah kondisi kesejahteraan mereka. Seiring dengan berjalannya pekerjaan sektor informal ini oleh pensiunan, timbul dampak sosial dan ekonomi. Dampak yang ada dalam bidang sosial lebih menekankan kepada kembalinya kepercayaan diri pensiunan, dampak dari ekonomi terpenuhinya kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Selain kemampuan PNS tersebut, terdapat fungsi yang meningkat karena pekerjaan informal yang pensiunan PNS yaitu fungsi pemulihan, fungsi pencegahan, fungsi Pengembangan dan fungsi Penunjang yang semuanya ada ketika berjalannya pekerjaan informal tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah, adanya peningkatan kesejahteraan pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan menggunakan pekerjaan di sektor informal dibuktikan dengan dampak-dampak yang timbul ketika berjalannya pekerjaan informal tersebut.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada umat di seluruh penjuru jagad raya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pekerjaan Sektor Informal Dalam Kesejahteraan Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun”.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas segala bantuan, kerjasama, dan kontribusi pemikiran yang diberikan. Penghargaan serta rasa terimakasih penulis sampaikan setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Partono M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
3. Akhmad Munif Mubarak S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas segala ilmu, motivasi, nasehat dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir hingga penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini;
5. Kedua orang tuaku dan, Ayahku Gumono dan Ibuku Siti Rowiyah yang telah memberikan motivasi, kesabaran, pengorbanan tanpa batas dan selalu memberikan untaian doa untuk anak-anaknya. Dan terima kasih untuk adikku Diah Nanda Putri Hanifah yang selalu memberikan keceriaan dan warna disetiap aktivitas;
6. Terima kasih untuk sahabatku Ilyan Azizah, Mardiyah Nur Rahmi, Oktaviantika, Krisna Ditya, Ary Kusuma W, Bielal M, Handika Subastian, Eri Yudho, Rahardian, Rifky R, Nizar yang selama ini sudah banyak memberikan

motivasi, dan membantu dalam proses penelitian serta bersama dalam suka dan duka;

7. Untuk teman-teman seperjuangan sekaligus menjadi keluarga di Jember, Marrisa Nur, Sukma A, Anggun, Gizanda, Khemal, Devis, Kurnia, Widad, Endah, Amanda Indah, Ika A, Fillah, Eka Wahyu, Dimas, Zulfahmi, Dhani, Novita selama ini kalian sudah banyak membantu saya dalam keadaan susah maupun senang.
8. Terima kasih untuk keluarga Messeran Nita, Adi, Vivi, Vian, Duvan, David, Hyoga, Tante Nur, Tante Yanti, Ita, Bintang, Diva, Siti Endarti yang telah menjadi keluarga dalam segala keadaan, kalian semua tangguh.
9. Terimakasih kepada keluarga KKN 90 Dwindah, Annisa, Arul, Ivan, Anwar, Yosi, Ike, Vina, dan Imlia yang telah memberikan banyak pelajaran terkait ilmu lintas jurusan.
10. Untuk pengurus HIMAKES periode 2013/2014 dan seluruh teman-teman serta dosen di lingkungan Universitas Jember yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi dalam setiap diskusi dan proses selama ini;
11. Seluruh informan dan Kepala BKD Kabupaten Madiun beserta jajaran, yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk memberikan informasi yang di butuhkan oleh penulis. Terima kasih atas segala kerjasamanya.

Sebagai manusia yang sarat keterbatasan, penulis tentunya menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Harapan yang tiada henti diinginkan penulis adalah adanya kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Jember, 20 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR FOTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Strategi Pemenuhan Kebutuhan .....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Kebutuhan Hidup .....	15
2.1.1 Ekonomi Kesejahteraan .....	19
<b>2.2 Usaha Kesejahteraan Sosial .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3 PNS (Pegawai Negeri Sipil) .....</b>	<b>26</b>
2.3.1 Pensiun .....	27
2.3.2 Tunjangan Pensiun .....	30

<b>2.4 Konsep Keluarga .....</b>	<b>33</b>
<b>2.5 Usaha Peningkatan Kesejahteraan Pensiunan PNS .....</b>	<b>36</b>
2.5.1 Pekerjaan Sektor Formal .....	39
2.5.2 Pekerjaan Sektor Informal .....	41
<b>2.6 Pekerjaan Informal Sebagai Usaha Kesejahteraan Pensiunan PNS</b> .....	<b>43</b>
<b>2.7 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>47</b>
<b>2.8 Kerangka Fikir .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>51</b>
<b>3.2 Penentuan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>53</b>
<b>3.3 Metode Penentuan Informan .....</b>	<b>54</b>
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>64</b>
3.4.1 Metode Observasi .....	64
3.4.2 Metode Wawancara .....	65
3.4.2 Dokumentasi .....	67
<b>3.5 Analisis Data .....</b>	<b>68</b>
<b>3.6 Metode Pengukuran Keabsahan Data .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>72</b>
4.1.1 Letak Geografis .....	72
4.1.2 Kondisi Demografis .....	74
4.1.2.1 Jumlah Penduduk .....	74
4.1.2.2 Tingkat Pendidikan.....	76
4.1.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi .....	78
4.1.2.4 Mata Pencaharian Penduduk .....	80
4.1.4 Keadaan Umum Pensiunan di Kabupaten Madiun.....	83
<b>4.2 Pekerjaan Sektor Informal sebagai Usaha Kesejahteraan</b> <b>Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun .....</b>	<b>89</b>

4.2.1	Kondisi dan Jenis Pekerjaan .....	89
4.2.1.1	Proses Pekerjaan Informal Pensiunan PNS.....	89
4.2.1.2	Jenis Pekerjaan Informal .....	96
4.2.1.3	Tingkat Pendapatan.....	104
4.2.2	Dampak Sosial Ekonomi dari Pekerjaan Sektor Informal yang Dilakukan oleh Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun	111
4.2.2.2	Dampak Sosial .....	113
4.2.2.1	Dampak Ekonomi .....	125
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	.....	<b>141</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	<b>141</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran</b> .....	<b>146</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Masa Kerja PNS .....	29
2.2 Daftar Tunjangan Pensiunan Pensiunan PNS .....	31
3.1 Proses Analisis Data .....	70
4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Berdasar Jenis Kelamin .....	77
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	79
4.3 Indeks Pembangunan Manusia .....	80
4.4 Mata Pencaharian Penduduk .....	82
4.5 Jumlah CPNS, PNS dan Pensiunan PNS .....	84
4.6 Daftar Lembaga dan Jumlah Pensiunan PNS.....	86
4.7 Karakteristik Pensiunan .....	88
4.8 Masa Kerja PNS.....	99
4.8 Jenis Pekerjaan Sektor Informal Pensiunan PNS.....	89
4.9 Daftar Penghasilan Pensiunan .....	111

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1.1 Toko Sarana Pertanian Bapak Sujito .....	4
2.1 Teori Hierarki Maslow .....	18
4.1 Peta Kabupaten Madiun .....	73
4.2 Mata Pencaharian yang Memiliki Posisi Pertama .....	83
4.3 Pekerjaan Informal Bapak Sutrisno .....	90
4.4 Pekerjaan Informal Bapak Masrikah.....	100
4.5 Toko Saprotan Informan Sarbini.....	103
4.6 Terbukanya Lapangan Pekerjaan oleh Ibu Masrikah.....	134
4.7 Terbukanya Lapangan Pekerjaan oleh Bapak Hartono.....	135

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Reduksi
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Data pensiunan Tahun 2014
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian Lemlit ke Baskesbankpol
- Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian Baskesbankpol ke BKD Kabupaten Madiun
- Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian Lemlit ke BKD Kabupaten Madiun
- Lampiran 8 Surat Selesai Penelitian

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika memasuki masa pensiun banyak dihadapkan dengan permasalahan ekonomi dan sosial. Permasalahan tersebut muncul karena kebanyakan para pegawai negeri sipil belum menyiapkan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada saat masa pensiun. Seseorang yang telah memasuki batas usia pensiun, akan sedikit demi sedikit kehilangan pekerjaan, peran sosial di masyarakat, kekuasaan, fasilitas, dan materi. Sedangkan Peranan masyarakat dan pembangunan menjadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Unsur sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap individu ini merupakan faktor penentu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawas baik dalam tugas umum pemerintahan maupun pembangunan. Sumber daya yang dimiliki oleh seorang individu dapat digunakan sebagai upaya peningkatan pembangunan.

Pensiun merupakan jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin masa tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Kedudukan dana pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa maka Pemerintah memberikan sumbangan kepada Pegawai Negeri oleh Burhanudin (1995:83). Hak yang diberikan oleh Pemerintah tersebut sangat sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeri setelah bertahun-tahun mengabdikan diri mereka kepada pemerintah dan masyarakat.

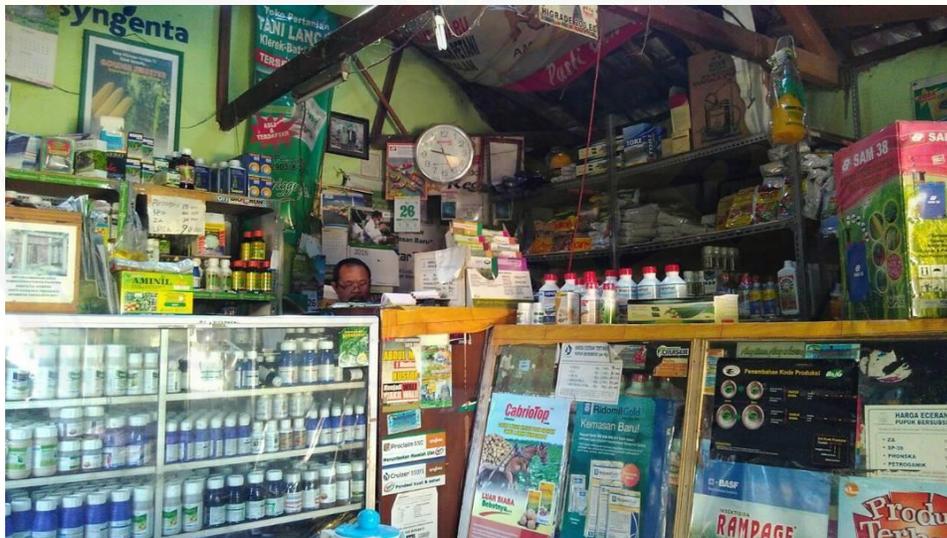
Tahun 2014 PNS yang mengalami purna tugas atau pensiun sebanyak 189 orang di daerah Madiun (Antara Jatim, 2015). Tahun 2015 menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 186 orang di daerah Madiun mengalami purna tugas atau pensiun. Kebanyakan dari mereka berasal dari tenaga pendidik mulai dari guru SD sampai dengan SMA. Perbandingan jumlah pensiun tahun 2014 dan tahun 2015

tentunya memiliki perbedaan. Tahun 2014 memiliki jumlah pensiunan yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015. Sebagian besar dari mereka berasal dari guru, tidak sedikit juga yang berasal dari staf pemerintahan. Dibutuhkan usaha untuk mencapai kesejahteraan dalam menghadapi pensiunan ini. Keadaan ketika menjadi PNS tentunya berbeda dengan keadaan ketika mereka pensiun.

Memasuki masa pensiun seharusnya disambut dengan ucapan syukur karena bisa menikmati waktu luang tetapi tetap dapat hidup sejahtera. Akan tetapi bagi pensiunan PNS di Kabupaten Madiun masa pensiun merupakan fase hidup baru yang lebih susah. Banyak pensiunan yang justru sibuk mencari pekerjaan baru untuk sekedar menopang hidup, dan mengendalikan fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Kesiapan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menghadapi masa pensiun bergantung pada persepsi pegawai negeri sipil mengenai pensiun itu sendiri bagi kehidupan mereka. Maka dari itu untuk mengurangi permasalahan-permasalahan, pensiunan PNS lebih mengarah ke pekerjaan sektor informal. Hal ini dikarenakan di dalam pekerjaan sektor informal, tidak ada status permanen atas pekerjaan dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Pekerjaan sektor informal menurut Jayadinata (1999:146) adalah kegiatan usaha yang bentuknya tidak terorganisasi (kebanyakan usaha sendiri), cara kerjanya tidak teratur, modal kerja dibiayai sendiri atau sumber tidak resmi serta dikerjakan oleh anggota keluarganya.

Berdasar pengakuan seorang pensiunan PNS di Madiun pada bulan Januari 2015 yaitu bapak Sujito beliau mengatakan bahwa keadaan ketika bekerja sebagai PNS dan keadaan ketika mereka pensiun sangatlah berbeda jauh dari segi pendapatan dan produktifitas. Ketika pendapatan masih berupa gaji PNS mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Kebutuhan dasar menurut ILO meliputi jumlah minimum tertentu yang dibutuhkan oleh suatu keluarga untuk konsumsi pribadi meliputi makanan, perumahan, sandang, serta perabot rumah tangga oleh Dadang (2011:408). Namun ketika mereka sudah memasuki masa pensiun, kebutuhan-kebutuhan tersebut sudah tidak bisa dipenuhi setiap bulannya karena gaji mereka sudah berupa tunjangan pensiun yang jumlahnya berkurang hampir 50% dari gaji

awal. Produktifitas yang dimiliki bapak Sujito tentunya menurun tidak seperti pada saat beliau aktif bekerja. Ketika bapak Sujito masih bekerja sebagai PNS, waktunya difokuskan untuk bekerja atau mengabdikan diri namun karena sekarang bapak Sujito sudah pensiun produktifitas untuk melakukan kegiatan juga ikut menurun. Keinginan untuk kerja di sektor formal sudah tidak lagi memungkinkan karena sudah memasuki lanjut usia yaitu 60 tahun. Salah satu usaha yang bapak Sujito lakukan adalah bekerja di sektor informal. Kesulitan yang dialami oleh bapak Sujito membuat beliau untuk mencari alternatif atau jalan lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Pada awalnya gaji sebagai pensiunan sebesar Rp. 3.000.000 hanya digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan karena dirasa kurang dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarganya, Bapak Sujito menggunakan uang tersebut sebagai modal membuka usaha toko saprotan (sarana produksi pertanian). Bapak Sujito membuka tersebut agar bisa mencapai kesejahteraan keluarganya. Selain hal tersebut bapak Sujito juga memiliki tujuan lain, meskipun beliau sudah berstatus sebagai pensiun setidaknya apa yang diperoleh selama bekerja di Dinas Pertanian dapat membantu masyarakat sekitar khususnya yang bekerja dalam bidang pertanian (Hasil Observasi Januari 2015 di Madiun).



Gambar 1.1 Toko Sarana Pertanian Bapak Sujito yang menjadi pekerjaan informal pada saat pensiun

Keadaan PNS ketika memasuki masa pensiun dirasa masih menjadi permasalahan yang mendasar karena tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Hal ini karena pensiunan yang belum siap memasuki masa pensiun belum memiliki pekerjaan lain yang kemudian tidak bisa digunakan sebagai tambahan penghasilan ketika pensiun nanti dan hal tersebut akan menimbulkan krisis di dalam keluarga mereka. Krisis keluarga biasanya timbul bila terjadi perceraian, salah satu anggota keluarga menderita sakit, kepala keluarga menganggur dan musibah lainnya oleh Sumarnonugro (1984:108). Kondisi tersebut sama halnya yang dialami oleh pensiunan PNS, karena mereka sudah tidak bekerja namun masih mendapat gaji pensiun yang jumlahnya setengah dari gaji mereka ketika aktif bekerja sebagai PNS. Untuk mengatasi krisis tersebut pensiunan harus berusaha agar kesejahteraan dapat dicapai meskipun sekarang mereka tidak bekerja lagi menjadi PNS aktif.

Perubahan keadaan atau struktur kegiatan pensiunan ada tiga hal yang hilang dalam kehidupan pegawai pertama, hilangnya kegiatan rutin yang dilakukan sejak kerja sampai pulang kerja, kedua kehilangan teman kerja, ketiga seseorang akan kehilangan sebagian pendapatan dan status yang disandang. Gaji yang berkurang lebih dari 50% yang menyebabkan pensiunan PNS harus mampu mengatasi kesulitan ekonomi dengan bekerja lagi di sektor informal karena hasil dari pekerjaan baru yang dilakukan bisa menutupi kekurangan yang ada. Gaji pensiun yang awalnya Rp. 2.000.000 bertambah ketika pekerjaan informal dijalankan menjadi 3.500.000-4.000.000 sehingga pada prosesnya pekerjaan ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan pensiunan tersebut. Sedangkan hilangnya status pekerjaan yang dimiliki pensiunan, dapat dipenuhi dengan status pekerjaan informal yang dilakukan oleh pensiunan pada saat ini. Sehingga keberfungsian pensiunan dapat kembali baik di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

PNS yang memasuki masa pensiun, mereka harus mampu berkoordinasi secara baik dengan keluarga untuk mengendalikan uang pensiun yang diperoleh setiap bulannya. Pengendalian dana atau keuangan dalam kehidupan rumah tangga dilakukan dengan *resource levels* yaitu pengendalian biaya dan peningkatan manfaat

(*benefit*) agar tidak terjadi ketimpangan oleh Totok (2003:144). Sumber-sumber disini bisa berupa tabungan yang dimiliki, uang saku (*liquiditas*), harta benda atau asset yang ada (rumah, tanah) ataupun keterampilan (*skill*). Anggota keluarga ikut berperan bersama dengan pensiunan untuk membantu mengelola sumber-sumber yang ada berdasarkan aspek manfaat. Karena ini ditujukan untuk tujuan kesejahteraan mereka di kehidupan sekarang maupun yang akan datang.

Istilah kesejahteraan sosial dirumuskan dalam UU RI No. 11 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 dalam Fahrudin (2014:10) kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan mental, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau tata kehidupan dimana setiap orang, setiap keluarga, setiap golongan atau masyarakat, selalu dapat merasakan adanya keselamatan lahir batin, maupun memenuhi kebutuhan hidupnya (baik material maupun spritual) serta menjalankan peran sosialnya dengan baik. Usaha kesejahteraan sosial tidak hanya dilaksanakan jika timbul hambatan atau masalah tetapi juga dilakukan sebagai pengembangan sumber-sumber daya untuk menumbuhkan, membina dan meningkatkan terwujudnya kesejahteraan sosial serta menunjang usaha-usaha lain yang mempunyai tujuan sama.

Pekerjaan Informal memiliki posisi yang tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang lain di Kabupaten Madiun. Untuk melakukan pekerjaan ini secara perizinan memang lebih mudah dibandingkan dengan pekerjaan formal. Kabupaten Madiun sendiri sebanyak 259.771 orang menggantungkan hidupnya di sektor informal (Pertanian, Kehutanan, Perburuan, perikanan, industri, perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Sedangkan 57.385 orang menggantungkan kehidupannya lebih ke sektor pemerintahan atau formal (Aparatur Sipil Negara atau PNS, Polisi dan TNI). Tentunya untuk sementara ini sektor informal masih menjadi favorit bagi semua kalangan, dengan kata lain ini menjadi tumpuan utama sebagai mata pencaharian penduduk di kabupaten Madiun. Diantara semua kalangan tersebut

terdapat pensiunan yang sekarang menggunakan pekerjaan informal sebagai salah satu mata pencaharian utama. Memang tidak semua pensiunan tahun 2014 melakukan pekerjaan tersebut, tetapi melihat peluang pekerjaan tentunya sektor informal adalah salah satu pekerjaan yang saat ini bisa dimasuki oleh pensiunan.

Pekerjaan sektor informal sangat mendukung dalam usaha pemenuhan kesejahteraan keluarga. Kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan menjadi hal yang sangat penting untuk masuk ke sektor ini. Peralihan dari pekerjaan formal yang kegiatannya terorganisir menjadi sektor informal yang kegiatannya mengarah ke dalam bentuk kemandirian menjadi hal baru bagi pensiunan. Mereka akan berhadapan dengan pekerjaan yang mengandalkan keaktifan dari diri sendiri. Sebagai pensiunan PNS, mereka harus mampu mempertahankan hidupnya meskipun tidak dalam kondisi bekerja. Karena di dalam Ilmu Ekonomi Kesejahteraan (*welfare economics*) seorang individu diajarkan untuk melakukan usaha yang menurut mereka itu adalah cara yang terbaik dalam mencapai kesejahteraan keluarganya meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki. Supardan (2010:378) ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*) adalah sebuah kajian ilmu ekonomi tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik atau optimal dalam menggunakan sumber-sumber yang terbatas. Sisi lain menurut disiplin ilmu kesejahteraan sosial mengarahkan bidang cakupannya kearah yang lebih luas.

Midgley dalam Adi (2013:23) mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Memasuki pekerjaan sektor informal menjadi pembuktian bahwa mereka dapat menggunakan kesempatan sosial secara maksimal dan kebutuhannya dapat terpenuhi sehingga permasalahan sosial dan ekonomi dapat diselesaikan. Bagi kebutuhan pensiun yang wajib dipenuhi, mereka harus mempertahankan ekonomi kesejahteraan dan kesejahteraan sosialnya agar mampu menuju kesejahteraan diri dan keluarganya. Sifat kebutuhan semakin hari bukan semakin menurun, melainkan semakin meningkat.

Peningkatan kesejahteraan individu maupun keluarga berhak dilakukan oleh siapa pun dengan cara yang berbeda di setiap usaha yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Madiun peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang “Dampak Sosial Ekonomi dari Pekerjaan Sektor Informal yang Dilakukan oleh Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun”. Dimana pekerjaan informal sangat berpengaruh untuk pemenuhan sosial dan ekonomi diri pensiunan PNS dalam mencapai kesejahteraan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan masih akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Suatu rumusan masalah berfungsi untuk memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam oleh Sugiyono (2011:209). Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana dampak sosial ekonomi dari pekerjaan sektor informal yang dilakukan oleh pensiun PNS di Kabupaten Madiun ?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merumuskan tujuan dari penelitian supaya mempunyai tujuan yang jelas dan tegas agar dapat mengarahkan seluruh kegiatan penelitian dengan baik. Pemahaman fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dampak sosial ekonomi dari pekerjaan sektor informal yang dilakukan oleh pensiunan PNS di Kabupaten Madiun.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat merupakan hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan manfaat yang didapatkan oleh peneliti :

1. Mengembangkan pengetahuan terhadap para peneliti dan dunia akademis dalam menjadikan kerangka analisis dan keilmuan dampak sosial dan ekonomi pekerjaan sektor informal, khususnya pensiunan PNS.
2. Memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, baik dalam memahami masalah kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh individu. Sehingga berbagai bentuk pekerjaan informal pensiunan PNS dapat menjadi upaya internal dan menjadi upaya yang dapat dilakukan secara mandiri serta berkelanjutan.
3. Penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran pemerintahan ataupun instansi terkait untuk lebih mengoptimalkan perencanaan PNS dalam memasuki masa pensiun, sehingga ketika proses pensiun berlangsung mereka dapat mempunyai tambahan penghasilan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan antara individu yang satu dengan yang lain tentunya memiliki perbedaan, hampir setiap orang ataupun kelompok memiliki permasalahan. Masyarakat dan permasalahannya sudah melekat pada dirinya masing-masing dan bagaimana cara mereka untuk menghadapi menjadi dasar permasalahan tersebut terselesaikan. Permasalahan yang sulit terselesaikan ini salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan atau pencapaian kesejahteraan. Masalah-masalah ini tentunya dapat diselesaikan dengan usaha kesejahteraan yang diterapkan pada masing-masing individu. Sumarnugroho (1987:39) mendefinisikan bahwa Usaha-Usaha Kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Hal ini juga dilakukan oleh pensiunan PNS di Kabupaten Madiun yang membentuk pekerjaan sektor informal untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada diri mereka.

Merujuk pada ungkapan Sumarnugroho di atas, usaha-usaha kesejahteraan yang dilakukan oleh pensiunan PNS termasuk usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa pensiunan. Secara umum ada 2 faktor penyebab timbulnya masalah-masalah kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Faktor dari dalam individu (intern), misalnya karena cacat fisik sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosial.
2. Faktor dari luar individu (ekstern), misalnya dari lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Dari ungkapan diatas, kondisi pensiunan tidak semuanya stabil karena tunjangan yang diberikan setiap bulannya. Stabil disini adalah kondisi pensiunan yang kebutuhannya sudah tercukupi dengan tunjangan artinya mereka tidak memerlukan usaha lagi dalam kesejahteraannya. Serta kondisi lingkungan yang sudah tidak mendukung pensiunan untuk ikut serta dalam menjalankan peran sosialnya dilingkungan masyarakat. Kondisi tersebut tentunya tidak dialami oleh semua

pensiunan, sebagian dari mereka masih memerlukan pekerjaan lain setelah menjadi pensiunan karena memang memerlukan tambahan penghasilan dalam kesejahteraannya kedepannya dan untuk mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Faktor dari dalam individu pensiunan adalah keadaan fisik yang sudah mulai melemah karena proses penuaan, sedangkan faktor dari luar individu adalah lingkungan keluarga yang kebutuhannya tidak bisa terpenuhi karena perubahan status dari PNS menjadi pensiunan. Ditekankan pada pemenuhan kebutuhan erat kaitannya dengan suatu tingkat pendapatan atau tingkat pendapatan merupakan suatu gambaran tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Wijaya (2005:43) yaitu:

“pendapatan seseorang dapat digunakan untuk menentukan atau mengukur tingkat kesejahteraan, karena dengan pendapatannya seseorang akan dapat mencapai kesejahteraan bila mampu memenuhi kebutuhan kebutuhannya.”

Pendapatan disini digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan karena dari pendapatan itulah mereka dapat memenuhi kebutuhan. Dikaitkan dengan tunjangan pensiun yang tidak terlalu besar tentunya mereka tidak bisa menggunakan tunjangan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraannya. Pensiun secara tidak langsung harus menggunakan sisa-sisa kemampuannya untuk membentuk pekerjaan baru yang setidaknya bisa menambah pendapatan. Dalam hal ini untuk mencari alternatif lain, pensiunan memiliki keterbatasan salah satunya usia yang sudah memasuki kategori lansia, menyebabkan mereka untuk memasuki dunia informal sebagai alat dalam kesejahteraan yang ingin dicapai oleh mereka. Menurut Breman dalam Manning (1991: 139) bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup dalam istilah “usaha sendiri”, merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit di cacah, sering dilupakan dalam sensus resmi, persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan hukum. Kondisi pensiunan sudah memasuki kategori lansia, menyebabkan mereka untuk memasuki dunia informal dalam usaha peningkatan kesejahteraan. Tidak lagi berhubungan dengan pemerintah merupakan tujuan mereka

saat ini, karena ada saat dimana mereka harus kembali ke masyarakat dan bekerja tanpa harus ada tanggung jawab yang besar.

Bekerja di sektor informal merupakan bagian dari usaha kesejahteraan sosial yang mana terdapat pensiunan yang melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya serta kegiatan sosial untuk mengembalikan dirinya berperan penuh terhadap lingkungan. Terdapat beberapa usaha yang dilakukan pensiunan untuk meningkatkan kesejahterannya yaitu dengan bekerja pada bidang perdagangan, jasa dan pertanian. Beberapa contoh dari Usaha kesejahteraan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi (Sumarnonugroho, 1984:39) :

1. Beberapa tipe unit usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktifitas individu, kelompok ataupun masyarakat contohnya adalah pelayanan konseling pada generasi muda dan lain-lain.
2. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para pekerja (yang masih produktif).
3. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehidupan keluarga dan masyarakat atau membantu mereka agar dapat mengidentifikasi dan mengembangkan “pemimpin” dari suatu komunitas lokal.

Pada dasarnya pensiunan bekerja di bidang sektor informal bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta mengembalikan kepercayaan dirinya dalam masyarakat. Namun, dalam meningkatkan penghasilan tersebut pensiunan melakukan beberapa hal. Pensiun harus dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh keluarganya terutama di bidang pemenuhan kebutuhan. Artinya mereka harus bisa membedakan kebutuhan mana yang memang harus dipenuhi atau sekedar menjadi pelengkap saja, sehingga nantinya keluarga dapat terpuaskan oleh usaha yang dilakukan oleh pensiunan tersebut. Ketika keluarga tercukupi karena adanya pekerjaan sektor informal, maka keluarga akan keluar dari permasalahan dan

pensiunan juga dapat menikmati masa-masa mereka beristirahat. Bahkan keluarga akan secara langsung ikut serta dalam usaha pemenuhan kebutuhan tersebut dan meringankan beban pensiunan.

Teori dan konsep perlu untuk menjelaskan bagaimana dampak sosial ekonomi pekerjaan informal berpengaruh dalam kesejahteraan pensiunan PNS di Kabupaten Madiun yang akan ada dalam tinjauan pustaka ini. Tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini. Tinjauan ini diperlukan untuk memperjelas arah acuan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan konsep yang akan digunakan bertujuan untuk memperjelas permasalahan agar dalam penelitian dapat diketahui batasan-batasan masalah, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari permasalahan yang sebenarnya. Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Teori menurut Neumen (2003) dalam Sugiyono (2012:52) adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sehingga dasar teori ini merupakan landasan berfikir untuk memahami serta menanggapi permasalahan yang ada.

## **2.1 Strategi Pemenuhan Kebutuhan**

Permasalahan pensiunan sebenarnya adalah permasalahan yang juga dihadapi oleh beberapa individu lain, yaitu bagaimana sebenarnya kemampuan pensiunan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga ditempat tinggalnya yang sesuai dengan preferensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pensiunan tersebut. Pensiun PNS di Kabupaten Madiun mampu merubah keadaan dari serba kekurangan menjadi keadaan yang lebih baik dari pada hanya mengandalkan tunjangan pensiun. Meskipun pada saat pensiun mereka hidup penuh pengorbanan, tujuan dari pengorbanan pensiun adalah untuk meraih kecukupan makan dan minum, papan serta pakaian. Usaha yang dilakukan pensiun tersebut tidak bisa dicapai secara mudah. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber, di sisi lain kebutuhan pensiun tidak

terbatas. Hal ini dibenarkan oleh Morris Morris (76:878) dalam the *American heritage dictionary* yang menjelaskan bahwa :

*“need is a condition or situation in which something necessary or desirable is required or wanted”*

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan adalah suatu keadaan atau situasi yang di dalamnya terdapat sesuatu yang perlu atau ingin di penuhi. Sesuatu yang ingin dipenuhi itu dianggap perlu, penting, atau harus dipenuhi dengan segera. Sedangkan keinginan menurut Philip Kotler (1997:9) merupakan hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan. Keinginan bukanlah sesuatu hal yang mendesak, jika tidak terpenuhi maka tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yaitu terlihat pada fungsinya. Keinginan yang tidak berpengaruh kepada kesejahteraan, ini berbanding terbalik dengan kebutuhan yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan oleh individu perlu dilakukan dengan strategi yang pasti sehingga bisa mencapai tujuan dari individu tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nunuk P Muniarti (2004:205) mengungkapkan bahwa dalam manajemen rumah tangga terdapat tiga unsur pokok, yang dalam praksisnya merupakan suatu proses. Tiga unsur pokok tersebut adalah:

- a. Pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan lebih dahulu suatu tindakan yang akan dikerjakan sesuai dengan tujuan dan sasaran anggotanya.
- b. Kedua adalah pelaksanaan, yaitu suatu pengendalian untuk mengetahui terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaannya.
- c. Dan unsur yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi yang dilakukan secara periodik sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota keluarga.

Pemenuhan kebutuhan merujuk pada strategi individu untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Ketiga unsur tersebut merupakan cerminan dari pemenuhan kebutuhan yang ingin dicapai oleh individu, perencanaan merupakan proses penentuan apa yang akan dicapai di masa mendatang dan dalam pembuatannya dengan sistematis sehingga bisa dilakukan pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat. Pelaksanaan disini sebagai salah satu sarana dari

perencanaan yang telah ditetapkan oleh individu dan dalam pelaksanaan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Kegiatannya ini melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Evaluasi adalah proses kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan tentang bagaimana berbuat baik pada waktu-waktu mendatang sesuai dengan yang telah direncanakan.

Unsur-unsur yang menjadi tahapan di setiap individu pensiunan harus mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika dilaksanakan ketiga unsur tersebut yang kemudian dalam penyempurnaannya dilakukan tahap evaluasi. Sebagaimana diungkapkan Thomas V. Bonoma dalam Setiawan dan Zulkiefilmansyah (1996:103) adalah *Success, Roulette, Trouble dan Failure*. Pertama, *Success* merupakan hasil yang paling diinginkan. Hal ini terjadi apabila kita dapat mengimplementasikan strategi yang kita buat. Kedua, *Roulette* adalah situasi dimana situasi yang diterapkan sesungguhnya kurang baik tetapi hasil yang didapat tidaklah mengecewakan karena kita mampu menerapkan strategi tersebut dengan baik disertai dengan berbagai penyesuaian. Ketiga, *Trouble* adalah strategi yang diformulasikan sebenarnya sudah cukup baik, namun penerapan strategi tersebut menjadi kacau dan tidak optimal. Keempat, *Failure* situasi yang tidak diinginkan oleh pembuat strategi. Formulasi strategi yang tidak baik ternyata diterapkan secara tidak baik juga, maka hasilnya terlihat jelas gagal dan hal ini akan menjauhkan tujuan yang sebenarnya.

Dimulai dari kemungkinan pertama yaitu kesuksesan dalam pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat akan memberikan kelancaran tersendiri terhadap kegiatan selanjutnya. Artinya apabila dalam perencanaan tersebut terjadi kesuksesan tentunya akan menjadikan motivasi tersendiri dalam usaha yang telah dilakukan untuk berproses menjadi yang lebih baik. Apabila hasil mengarah kedalam kegagalan yaitu *Roulette, Trouble dan Failure* akan membutuhkan beberapa usaha yang lebih

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, tentunya dalam hal ini tergantung bagaimana individu untuk konsisten dalam menjalankan setiap perencanaan yang telah dibuat.

Pensiunan harus menyesuaikan dengan sumber yang mereka miliki, tidak memaksakan hasil karena setiap apa yang dilakukan tentunya harus ada proses. Sehingga dari potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal. Moslow (1960) mengidentifikasi kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya atau hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya. Sebagaimana halnya hukum keseimbangan yang berlaku bahwa pengorbanan manusia hendaknya sama dengan perolehan atau hasil yang hendak dicapai. Tata cara untuk menyeimbangkan kedua aspek ini tidak lain adalah dengan mengkalkulasi berapa besarnya pengorbanan dibandingkan dengan hasil yang hendak ditargetkan. Pengorbanan yang dimaksudkan dalam konsep ini adalah biaya hidup, dan hasil yang ditargetkan adalah pendapatan yang diterima. Bila kedua aspek ini berada dalam kondisi yang seimbang maka yang bisa diperoleh adalah kepuasan.

Tiga tahapan tersebut dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan anggotanya. Dimulai dengan tahapan yang pertama yaitu perencanaan, ketika memasuki masa pensiun akan muncul permasalahan sehingga mereka dapat menyusun rencana untuk mengatasi hambatan yang ada. Hambatan yang ditemui pensiunan di kabupaten madiun, adalah bagaimana mereka mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhannya dan bagaimana mereka mampu mengembalikan perannya di dalam masyarakat (hasil observasi pada bulan Januari 2015). Kemampuan mereka pada saat mereka masih berstatus PNS tentunya digunakan ketika mereka pensiun seperti PNS yang bekerja di Dinas pertanian, ketika mereka pensiun mereka bisa menggunakan kemampuan yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. Unsur yang terakhir ketika semua usaha yang ditempuh mendapatkan kegagalan pensiunan bisa mengevaluasi kembali bagaimana berjalannya pengorbanan yang mereka lakukan.

### 2.1.1 Kebutuhan Hidup

Kebutuhan hidup disebut juga kebutuhan dasar atau *basic human needs* Totok (2003:15) adalah kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu (makan dan minum, papan, serta pakaian) maupun keperluan pelayanan sosial (air, minum, sanitasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan). Ini juga dibenarkan oleh Samir Ridwan dan Torkel Alfhan dalam Sumardi (1982:2) mengemukakan bahwa kebutuhan hidup minimum seseorang individu atau rumah tangga terdiri dari makan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, transportasi, partisipasi. Kebutuhan hidup yang bermacam tersebut, dari pihak kita harus memikirkan alternatif ekonomi yang memang harus diterapkan. Istilah kebutuhan dasar mulai dipakai secara luas sejak Konferensi Tenaga Kerja Dunia (ILO) yang berlangsung di Jenewa tahun 1976, yang mengemukakan bahwa kebutuhan dasar memiliki dua unsur :

- a. Kebutuhan dasar yang meliputi jumlah minimum tertentu yang dibutuhkan oleh suatu keluarga untuk konsumsi pribadi, meliputi: makanan, perumahan, sandang, serta perabot dan peralatan rumah tangga.
- b. Kebutuhan dasar yang meliputi layanan pokok yang disediakan oleh dan untuk komunitas secara keseluruhan seperti: kesehatan, pendidikan, air minum yang aman, sanitasi, angkutan umum, dan fasilitas-fasilitas budaya.

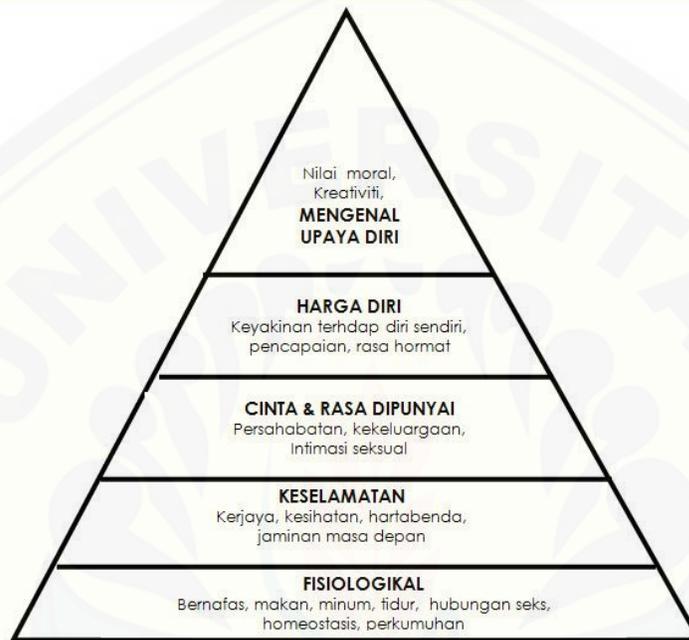
Kebutuhan Dasar Manusia adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua manusia dan kebutuhan tersebut berfungsi agar seseorang dapat bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia dapat memilih untuk melakukannya secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar menentukan tingkat kesejahteraan seseorang. King dalam Potter (2005) mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia berfokus pada tiga sistem yakni, sistem personal, interpersonal, dan sistem sosial. Sistem personal adalah individu yang mencakup persepsi, diri pribadi, pertumbuhan dan perkembangan, citra tubuh, ruang dan waktu. Sistem personal dibentuk oleh interaksi antara 2 orang atau lebih. Sistem sosial sebagai sistem pembatas peran organisasi sosial, perilaku dan

praktek yang dikembangkan untuk memelihara nilai dan mekanisme pengaturan antara praktik dan aturan yang ada.

Lebih lanjut, Supardi (2002:81) berdasarkan pendapat Mc. Clelland berpendapat bahwa manusia didasari oleh tiga kebutuhan yaitu, kebutuhan untuk berprestasi (*achievement*), kebutuhan untuk berkuasa (*n-power*), dan kebutuhan untuk berafiliasi (*n-affiliation*). Prestasi atau *Achievement* menunjukkan keinginan individu untuk secara signifikan berprestasi, menguasai skil, pengendalian atau standard tinggi. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain.

Perubahan kondisi pensiunan akan aktivitas rutin yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, akan memutuskan jaringan sosial yang sudah terbina dengan rekan kerja, dan yang terutama adalah menghilangnya identitas diri seseorang yang sudah melekat begitu lama sebagai karyawan ini erat kaitanya bahwa pada masa bekerja tersebut pensiun memiliki kekuasaan. Pada masa ini pensiunan akan mengalami perubahan secara keseluruhan dalam pola kehidupannya. Perubahan pola kehidupan dapat membuat sebagian pensiun mengalami kecemasan pada saat menghadapi masa pensiun ini, karena masa pensiun menimbulkan perasaan tidak berguna bagi individu yang akan memasuki masa pensiun baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Meskipun pensiun adalah dambaan semua orang, karena semakin lama bekerja akan semakin lelah sehingga membutuhkan istirahat. Tetapi pada kenyataannya orang takut bila menghadapi masa pensiun, mereka takut kehilangan masa keberartiannya.

Didasari apa yang diungkapkan oleh Maslow dalam Manajemen Rumah Tangga Totok (2003:33) kebutuhan-kebutuhan manusia itu dapat digolongkan dalam lima tahap (tingkat) yang digambar dalam bentuk piramida, antara lain :



Gambar 2.1 Teori Hierarki Maslow

Kebutuhan-kebutuhan yang digolongkan oleh Abraham Maslow menjadi dasar apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Berikut adalah keterangan yang ada di setiap 5 komponen kebutuhan tersebut :

1. Kebutuhan Fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Antara lain ; pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual.
2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan, dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik, meliputi perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan seperti kecelakaan, penyakit, bahaya lingkungan, dll. Perlindungan psikologis, perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang.

3. Kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan kekeluargaan.
4. Kebutuhan akan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain serta pengakuan dari orang lain.
5. Kebutuhan aktualisasi diri, ini merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.

Manusia memiliki lima tingkat kebutuhan hidup yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya. Lima tingkatan yang dapat membedakan setiap manusia dari sisi kesejahteraan hidupnya, meskipun manusia tersebut memiliki keterbatasan kondisi fisik maupun sumber daya. Kebutuhan tersebut berjenjang dari yang paling mendesak hingga yang akan muncul dengan sendirinya saat kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi. Setiap orang pasti akan melalui tingkatan-tingkatan itu, dan dengan serius berusaha untuk memenuhinya. Lima tingkat inilah yang kemudian menjadi dasar bagi setiap pensiunan. Terutama kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan paling dasar yang ada dalam diri manusia, yang secara tidak langsung wajib dipenuhi meskipun dengan keterbatasan kondisi yaitu fisik yang melemah. Pensiunan PNS sama halnya dengan kebutuhan manusia lainnya bersifat tidak terbatas karena semakin berkembangnya jaman, kebutuhan semakin meningkat. Keadaan pensiun PNS juga diharuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya Pensiunan yang mengandalkan tunjangan dari pemerintah untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, dan kebutuhan anak yang masih dalam proses mengejar cita-citanya tentu menjadi kesulitan tersendiri. Pensiunan dipaksa bertahan untuk mewujudkan dan mensejahterakan keluarganya.

Kebutuhan dasar pensiunan tidak cukup lagi didefinisikan hanya dengan mengacu kepada kebutuhan fisik pensiunan saja, melainkan harus melibatkan syarat-syarat fisik serta layanan lainnya yang dibutuhkan oleh komunitas lokal. Penguraian kebutuhan dasar yang ada pada pensiunan bergantung pada beberapa asumsi mengenai berfungsinya dan berkembangnya masyarakat. Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ini, pensiunan memperhitungkan sumber pemenuhan

kebutuhan, yakni pendapatan yang mereka terima. Besarnya pendapatan harus disesuaikan dengan besarnya pengeluaran.

### 2.1.2 Ekonomi Kesejahteraan

Kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau masyarakat untuk membuat keputusan tentang cara terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di satu pihak kegiatan ekonomi meliputi usaha individu, perusahaan, dan perekonomian secara keseluruhannya untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Selain itu, kegiatan ekonomi meliputi pula kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Menurut Sadono (2009:4) kegiatan ekonomi dapat didefinisikan :

“Kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.”

Sebagai seorang individu atau masyarakat yang melakukan tindakan ekonomi, dalam berjalannya kegiatan ini tentunya pensiunan akan memperoleh beberapa pilihan alternatif untuk melakukan kegiatan tersebut dengan bekerja di sektor informal ataupun memanfaatkan sumber daya yang ada. Berdasarkan alternatif yang telah tersedia, mereka mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik sesuai dengan kondisi mereka. Tujuan dari adanya pemilihan alternatif tersebut, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kesejahteraan yang paling maksimum kepada individu dan masyarakat. Kebanyakan analisis ekonomi berkaitan dengan aspek ekonominya yaitu bagaimana mencapai kesejahteraan maksimum atau optimum bagi masyarakat yang ada dalam sistem perekonomian. Menurut As'ad (1998:23) tindakan ekonomi merupakan usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan paling baik dan paling menguntungkan. Sehingga dengan kata lain pensiunan dapat melanjutkan hidupnya dengan melakukan

tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi tersebut digunakan agar kebutuhan hidup pensiunan dapat terpenuhi.

Ekonomi dan kesejahteraan memiliki hubungan yang tentunya tidak bisa terpisahkan antara komponen satu dengan yang lainnya. Pengaruh yang ada apa kedua aspek tersebut sangatlah kuat. Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek saja, tetapi juga memberi peningkatan bagi kesejahteraan banyak orang dalam Negara. Individu dikatakan mencapai kesejahteraan Menurut Suharto (2014:34) mencakup 3 konsep :

1. Kondisi kebutuhan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial.
2. Institusi, area atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Aspek-aspek tersebut yang diperlukan setiap individu ataupun masyarakat untuk mengukur tingkat kesejahteraan mereka. Sebagai anggota masyarakat berkewajiban untuk mencari jalan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang menunjang kepentingan bersama/tujuan bersama. Masyarakat berkewajiban untuk menunjang pemenuhan kebutuhan individu dan berhak untuk mengembangkannya melalui partisipasi ataupun kontribusi warga masyarakatnya.

Ilmu ekonomi kesejahteraan (*Welfare Economic*) adalah kajian ilmu ekonomi tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik atau optimal dalam menggunakan sumber-sumber yang terbatas Pearce dalam Dadang Supardan (2010:378). Fokus utama *welfare economic* adalah optimalisasi dan kesejahteraan sosial. Optimalisasi merupakan maksimalisasi kesejahteraan sosial, sedangkan kesejahteraan sosial merupakan jumlah kemakmuran semua anggota dari masyarakat tertentu oleh Swasono (2005:2). Untuk menentukan kesejahteraan seseorang meningkat, memerlukan penataan definitif lebih lanjut, berarti bahwa peningkatan

kesejahteraan seseorang tersebut telah terjadi tanpa diikuti dengan makin memburuknya keadaan kesejahteraan orang lain. Dengan demikian, kesejahteraan sosial meningkat apabila ada satu orang individu yang meningkatkan kesejahteraannya, dan tidak ada individu yang mengalami penurunan kesejahteraan. Terdapat dua jenis ekonomi kesejahteraan Dominick (2009:56), yaitu :

- a. Ekonomi kesejahteraan konvensional  
Ekonomi kesejahteraan konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*)
- b. Ekonomi kesejahteraan syariah  
Ekonomi kesejahteraan syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami.

Ekonomi kesejahteraan membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan ekonomi bisa berjalan secara optimal. Ekonomi kesejahteraan dalam bahasanya juga akan memikirkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kajian ini mengarahkan kegiatan ekonomi akan memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi. Pengertian yang lebih luas, ekonomi kesejahteraan adalah pembahasan yang tidak terlepas dari konteks ilmu sosial. Meij dalam Abdullah (1992:6) berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Pendapat tersebut sangat realistis karena ditinjau dari aspek ekonomi dimana manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), pada hakikatnya mengarah pada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan utama dalam kehidupan ekonomi manusia.

Ilmu ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan yang diharapkan, dengan memilih kegunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka ataupun terbatas. Dapat dikatakan ilmu ekonomi merupakan suatu aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia. Usaha pensiunan untuk mencapai kesejahteraan mereka dan keluarga mereka dilakukan dengan berbagai cara dengan usaha yang maksimal tentunya. Mereka bekerja di sektor informal seperti peternak, pertanian, dan berdagang. Dari usaha-usah tersebut yang kemudian membawa mereka ke arah *Welfare Economic*. Manusia diharuskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja. Sebagai pensiunan PNS, mereka mampu mempertahankan hidupnya dengan bekerja karena di dalam Ilmu Ekonomi Kesejahteraan (*welfare economics*) seorang individu diajarkan untuk melakukan usaha yang menurut mereka itu adalah cara yang terbaik dalam mencapai kesejahteraan keluarganya meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki.

## 2.2 Usaha Kesejahteraan Sosial

Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan manusia jika tidak berada dalam masyarakat (sosial). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat KBBI (1996:958). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya, mereka secara tidak langsung memanfaatkan orang lain. Dari kesalingketergantungan ini, mereka bisa memperoleh sebuah bentuk kerjasama yang bersifat tetap dan dapat memberikan manfaat antara manusia satu dengan yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan definisi Ilmu Kesejahteraan Sosial, pada dasarnya ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi dan teknik untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Adi (2005:17) yang berpendapat bahwa Ilmu Kesejahteraan

sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang. Sedangkan menurut Suharto (2005:10) kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial di dalam berbagai bentuk kegiatannya meliputi semua bentuk intervensi sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan sosial dewasa ini lebih ditujukan guna mencapai produktivitas yang maksimum, setiap masyarakat perlu mengembangkan cara-cara meningkatkan kemampuan, melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan dan masalah-masalah yang dapat mengurangi dan merusak kemampuan yang telah dimiliki. Hampir sama dengan Usaha kesejahteraan sosial yang lebih mengacu pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan yang secara konkret (nyata) berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah yang dihadapi anggota masyarakat.

Usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974, Usaha-Usaha Kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial oleh Sumarnonugroho (1987:39). Kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sebenarnya saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya, tetapi untuk sekarang pensiun lebih membutuhkan usaha kesejahteraan karena mereka memiliki kegiatan atau usaha-usah untuk mengarah ke dalam peningkatan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan hal di atas dapat dirasakan bahwa kesejahteraan sosial tidaklah bermakna bila tidak diterapkan dalam bentuk usaha kesejahteraan sosial yang nyata

menyangkut kesejahteraan masyarakat. Dari terminologi tersebut terlihat bahwa usaha kesejahteraan sosial seharusnya merupakan upaya yang konkret (nyata) baik ia bersifat langsung (direct service) ataupun tidak langsung (indirect service), sehingga apa yang dilakukan dapat dirasakan sebagai upaya yang benar-benar ditujukan untuk menangani masalah ataupun kebutuhan yang dihadapi warga masyarakat, dan bukan sekedar program, pelayanan ataupun kegiatan yang lebih dititik beratkan pada upaya menghidupi organisasinya sendiri ataupun menjadikan sebagai “panggung” untuk sekedar mengekspresikan penampilan diri seseorang dalam suatu lembaga. Leonard Scheneiderman berdasarkan rumusan atau pendapat dari PBB dan beberapa ahli bidang kesejahteraan sosial, secara terperinci menguraikan tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial, yakni:

a. *System Maintenance*

Tujuan sistem ini mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan atau kelangsungan keberadaan serta tatanan nilai-nilai sosial.

b. *System Control*

Tujuannya adalah mengadakan kontrol secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada.

c. *System Change*

Tujuan sistem ini adalah mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

Menjalankan usaha kesejahteraan kemudian melahirkan sistem kesejahteraan sosial yang berdampak pada berjalannya usaha yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan pensiunan dapat dicapai apabila mereka mampu melakukan dan berjuang untuk memenuhi kehidupan. Salah satu sistem itu adalah *system change* atau perubahan artinya pensiunan membutuhkan sistem ini terlebih dahulu untuk mengubah pemikirannya dan mengatasi kekurang yang dimiliki, karena dari sistem inilah perubahan itu dimulai. Setelah sistem ini diterapkan baru ada kelanjutan sistem baru yaitu *system control* yang mengontrol perubahan itu mengarah pada hal yang baik atau buruk, namun meskipun hasilnya baik atau buruk pensiunan

akan tetap melakukan *system maintenance* karena bisa mengatasi permasalahan yang ada. Fungsinya menyeimbangkan dan memperbaiki usaha yang telah dibuat oleh pensiunan tersebut.

Terkait dengan pensiunan, setelah mereka tidak aktif bekerja dan kehidupan mereka ditopang oleh uang pensiun yang diberikan oleh pemerintah tentunya mereka harus secara cermat menyusun strategi pemenuhan kebutuhan untuk mensejahterakan kehidupannya. Bagaimana mereka mampu menghadapi permasalahan terkait dengan kesejahteraan sosial mereka setelah mereka memasuki masa pensiun. Tentunya tidaklah mudah, karena kebutuhan sebelumnya mereka mendapatkan gaji perbulan yang cukup dari pemerintah namun ketika mereka sudah tidak aktif lagi tunjangan itupun berkurang setengahnya. Usaha kesejahteraan mereka yang lain seperti mencari pekerjaan tambahan kadang terhalang oleh usia. Jika dikaitkan dengan usia, pensiunan tersebut sudah tidak produktif lagi untuk melakukan pekerjaan. Konsep ini digunakan untuk mengukur usaha apa saja yang digunakan pensiunan untuk bertahan hidup ketika mereka sudah tidak aktif.

### **2.3 PNS (Pegawai Negeri Sipil)**

Para ahli seperti Kranenburg dan Logemann mendefinisikan Pegawai Negeri menurut pemikiran mereka. Pengertian Pegawai Negeri menurut Kranenburg adalah Pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dsb. Pengertian Pegawai Negeri menurut Logemann dalam Muchsan dalam Sri Hartini (2008:31) adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Logemann menyoroti dari segi hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri.

Definisi lain terkait dengan PNS terdapat di dalam UU No.5 tahun 2004 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan. PNS adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tepat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil harus mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara terhadap apa yang menjadi tugas mereka. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tugas yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat PembinaKepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan pegawai negeri tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan perkataan lain, Pemerintah bukan hanya menjalankan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian, bahwa pegawai negeri sipil berada sepenuhnya di bawah pimpinan Pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin persatuan dan kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.

PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan pengertian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa PNS harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dan sebuah jabatan dan atau tugas negara lainnya yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. PNS juga mendapatkan digaji menurut UU yang berlaku.

### 2.3.1 Pensiun

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa dari pegawai negeri yang telah bertahun tahun

mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai Negeri. Terhitung mulai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka ditentukan batas usia pensiun :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi (Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Pembayaran gaji kepada PNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihentikan pada bulan berikutnya setelah pejabat tersebut mencapai usia 80 (enam puluh) tahun.
3. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi belum berusia 68 (enam puluh) tahun, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila telah diberhentikan dari jababnnya dan belum diterbitkan surat keputusan pemberhentian dengan honnat sebagai PNS, maka brhadap PNS dimaksud berlaku batas usia pensiun dan diberikan pernbeyaran gaji sampai dengan usia 58 (lirna puluh delapan) tahun;
  - b. Apabila blah diberhentikan dari jabatannya dan usianya 58 (lma puluh delapan) tahun atau leblh, maka dibehentikan sebagai PNS dan dihentikan pembayaran gajinya terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatannya;
  - c. Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan keputusan pernbherhentian dengan hormat sebagai PNS blah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya sebagai PNS ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentiannya sebagai PNS.

Dasar aturan tersebut menjadikan pensiun sebagai salah satu hak istimewa yang diterima oleh PNS. Dikatakan istimewa karena memang pada masini PNS diberi kesempatan untuk melepaskan semua atribut dan tanggung jawabnya yang besar

kepada negara dan kembali lagi ke masyarakat dengan status pensiun. Menurut Prof. Dr. Notonagoro hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, harus (sesuatu yang harus dilaksanakan). Hak dan kewajiban yang memang harus dilakukan pegawai negeri sipil memang sudah sebanding dengan apa yang dilakukannya untuk negara dan pemerintah. Pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Dari tugas yang besar itu pegawai negeri wajib melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadarab dan tanggung jawab. Peran pemerintah sangat menentukan kesejahteraan mereka karena anggaran yang digunakan untuk membiayai kehidupan mereka semua dijamin dan dilakukan oleh pemerintahan terkait.

Tabel 2.1 Masa Kerja PNS

<b>Nama Informan</b>	<b>Tahun Mulai-Selesai</b>	<b>Lama Pengabdian</b>
Informan Elliyanti	1986-2014	28 Tahun
Informan Sutrisno	1984-2014	30 Tahun
Informan Sudarto	1987-2014	27 Tahun
Informan Sunarno	1981-2014	33 Tahun
Informan Sutiati	1977-2014	37 Tahun
Informan Masrikah	1984-2014	30 Tahun
Informan Martiati	1985-2014	29 Tahun
Informan Suyitno	1986-2014	28 Tahun
Informan Hartono	1988-2014	26 Tahun
Informan Sarbini	1984-2014	30 Tahun

Sumber : Informan Pokok dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun

Disamping norma kesetiaan yang ada di diri pegawai negeri, terdapat juga orientasi yang mengarah ke dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan seorang Pegawai Negeri Sipil berfungsi untuk motivator dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya pada setiap pegawai diharapkan bisa berkembang sikap disiplin dan keteladanan yang menjadi panutan masyarakat. Pembinaan pegawai negeri ke arah yang di inginkan memerlukan perencanaan, pengaturan, dan pengawasan yang tercakup dalam administrasi kepegawaian. Berdasarkan atas kenyataan ini, maka peranan administrasi kepegawaian dalam pembangunan tak dapat diabaikan. Untuk itu diperlukan penataan yang lebih baik agar setiap orang pegawai dapat berproduksi secara optimal.

### 2.3.2 Tunjangan Pensiun

Pengertian pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Beberapa batasan akan dikemukakan di bawah ini, dan secara garis besar dapat dibagi berdasarkan pandangan mengenai peran pekerjaan itu sendiri dan tinjauan definisi dari sudut psikologi perkembangan. Dana pensiun ditinjau dari segi pihak yang membiayai dan mengelola oleh Widjaja (1996:26) yaitu :

1. Pemberi kerja (dan karyawan) yang membiayai dan mengelola.
2. Pemberi kerja (dan karyawan) yang membiayai tapi dikelola oleh yayasan sendiri.
3. Karyawan sendiri yang mengelola program pensiun pribadinya untuk dikelola pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke-13 dalam Tahun Anggaran 2015 kepada PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan (dikutip dari Setkab). Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mengatur mengenai jaminan hari tua bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan santunan kematian bagi keluarga mereka. Pensiunan PNS dan anggota militer berhak mendapatkan tunjangan pensiun bulanan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus setelah mencapai usia pensiun.

Tunjangan pensiun bulanan berjumlah 2,5% dari gaji bulanan terakhir dikalikan dengan jumlah tahun pengabdian, sampai maksimum 80%, sementara jumlah keseluruhan jaminan hari tua berdasarkan perkalian jumlah tahun pengabdian, gaji akhir, dan 0,6 (faktor pengali yang ditentukan oleh Menteri Keuangan).

Peraturan mengenai gaji dan pensiun sesuai dengan golongan yang dimiliki PNS tentunya menjadi patokan besar kecilnya uang tunjangan yang akan diterima ketika mereka pensiun. Jaminan masa tua atau pensiun, memberikan gambaran menarik bagaimana hidup mereka setelah tidak aktif berkerja. Mereka bekerja hampir satu minggu penuh dan memiliki waktu libur hari sabtu dan minggu. Rutinitas sangat padat mereka jalani untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Negara serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak lagi bekerja secara resmi dan waktu mereka kebanyakan dihabiskan di lingkungan rumah. Kesibukan yang biasa dijalani sudah tidak seperti dulu lagi.

Tabel 2.2 Daftar Jumlah Tunjangan Pensiunan PNS

Nama Informan	Gaji PNS	Pangkat Terakhir	Jumlah Tunjangan Pensiun
Elyanti	Rp 4.429.300	Pengatur Tingkat I (III/d)	Rp 3.049.600
Sutrisno	Rp 5.173.400	Pembina Tingkat I (IV/b)	Rp 3.302.000
Sudarto	Rp 3.994.200	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Rp 2.807.100
Sudarno	Rp 4.294.000	Penata Tingkat I (III/d)	Rp 3.049.600
Sutiati	Rp 4.665.000	Pembina Tingkat I (IV/b)	Rp 3.313.100
Masrikah	Rp 4.569.900	Pembina Tingkat I (IV/b)	Rp 3.049.600
Martiati	Rp 3.912.600	Penata Tingkat I (III/d)	Rp 3.049.600
Suyitno	Rp 4.035.800	Penata Tingkat I (III/d)	Rp 3.049.600
Hartono	Rp 3.912.600	Penata Tingkat I (III/d)	Rp 3.049.600
Sarbini	Rp 4.162.900	Penata Tingkat I (III/d)	Rp 3.049.600

Sumber : Informan Pokok dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun

Dana pensiun ini telah menjadi elemen yang pokok dalam kehidupan sosial ekonomi modern, yang telah berkembang jauh diluar permasalahan teknis penyelenggara saja. Dalam hal ini pensiun berperan sebagai pihak yang menerima balas jasa dari pemerintah berupa tunjangan yang diberikan perbulan atas pekerjaan yang dilakukan bertahun-tahun.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengungkapkan setidaknya hingga kini ada dua skema terkait dengan pembayaran pensiun PNS:

- a. *Pay as You Go (Current Cost Method)* adalah sistem pendanaan pensiun di mana biaya untuk pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh perusahaan (pemberi kerja). Pada *pay as you go*, perusahaan membiayai manfaat pensiun peserta begitu peserta memasuki masa pensiun. Di sini tidak ada pemupukan dana yang dilakukan peserta ataupun pemberi kerja yang dikelola badan khusus yaitu PT TASPEN.
- b. *Fully Funded System* adalah sistem pendanaan pensiun di mana besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun dipenuhi dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran antara peserta dan pemberi kerja selama karyawan masih aktif bekerja. Pada *fully funded system* ada pemupukan dana yang bersumber dari peserta dan pemberi kerja. Pemupukan dana bisa dimulai sejak seseorang menjadi karyawan tetap dan sebagai peserta dana pensiun. Dengan demikian, akumulasi pemupukan dana digunakan untuk membayar manfaat pensiun pada saat peserta memasuki masa pensiun.

Sistem pembayaran pensiun PNS '*Pay As You Go*' dengan '*Fully Funded*' tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek sumber pembayaran gaji itu sendiri. '*Pay As You Go*' merupakan sistem pembayaran gaji pensiun PNS yang masih diterapkan sampai saat ini dan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh pembayaran gaji pensiunan PNS dibayarkan secara langsung dari APBN setelah pegawai yang bersangkutan mulai memasuki masa pensiun (TASPEN, 2015).

Penyelenggaran dana pensiunan ini jika ditinjau dari segi makro ataupun mikro menjadi suatu hal yang penting Widjaja (1996:7). Secara makro, dalam masa pembangunan dewasa ini Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana

pensiun merupakan salah satu sumber dana dalam negeri yang cukup potensial yang belum digunakan secara optimal. Secara mikro, dana pensiun juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia yang telah ada.

Dengan adanya dana pensiun kesejahteraan para pegawai bisa terjamin di masa tuanya dan mereka juga dapat bekerja dengan tenang. Transisi Pegawai Negeri dari aktif bekerja hingga mereka masuk masa pensiun tentunya menyebabkan peran yang tidak seimbang. Transisi ini meliputi perubahan peran dalam lingkungan sosial, perubahan minat, nilai dan perubahan dalam segenap aspek kehidupan seseorang. Jadi seseorang yang memasuki masa pensiun, bisa merubah arah hidupnya dengan mengerjakan aktivitas lain, tetapi bisa juga tidak mengerjakan aktivitas tertentu lagi. Untuk pensiunan di kabupaten madiun tidak sedikit dari mereka memilih merubah arah hidupnya dengan mengerjakan aktivitas lain. PNS di Kabupaten Madiun melakukan kegiatan lain untuk mengembalikan peran yang tidak seimbang dengan bekerja di sektor informal.

#### **2.4 Konsep Keluarga**

Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya dan perilaku dari anggota keluarga tersebut. Dari keluargalah pendidikan kepada individu dimulai, tatanan masyarakat yang baik diciptakan, budaya dan perilaku atau nilai kebenaran dapat lebih dini ditanamkan. Oleh karena itu, keluarga mempunyai posisi yang strategis untuk dijadikan sebagai unit pencapaian kesejahteraan karena masalah kesejahteraan dalam keluarga saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar anggota keluarga, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi juga keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya. Menurut Koerner dan Fitzpatrick (2004) dalam Lestari (2012:5) definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional dan definisi intersaksional.

1. Definisi struktural bahwa keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga seperti orang tua ,

anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*).

2. Definisi Fungsional bahwa keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-sungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang ada di dalam keluarga.
3. Definisi transaksional bahwa keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi di dalam keluarga transaksional lebih memfokuskan bagaimana keluarga menjalankan fungsinya.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam keluarga itu terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan kuat, bahkan hubungan tersebut bisa di sebut dengan hubungan lahir batin. Adanya hubungan ikatan darah menunjukkan kuatnya hubungan yang dimaksud. Hubungan antara keluarga tidak saja berlangsung selama mereka masih hidup tetapi setelah mereka meninggal dunia pun masing-masing individu masih memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Didalam kelompok primer ini terbentuklah norma-norma social berupa *frame of reference* dan *sense of belonging*. Didalam keluarga manusia pertama kali memperhatikan keinginan orang lain, belajar sama dan belajar membantu orang lain. Dinyatakan oleh Chapman dalam Herien (2005:20) bahwa keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan, seperti peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar untuk mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (meaning) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Bahkan dengan tidak adanya peraturan maka akan tumbuh atau terbentuk suatu generasi penerus yang

tidak mempunyai daya kreasi yang lebih baik dan akan mempunyai masalah emosional serta hidup tanpa arah.

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya Soerjono (2004: 23). Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya (BKKBN, 1992).

Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai. Hubungan keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh Robert R. Bell dalam Ihromi (2004: 91), yaitu:

- a. Kerabat dekat (conventional kin) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua-anak, dan antar-saudara (siblings).
- b. Kerabat jauh (discretionary kin) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat.

Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu.

- c. Orang yang dianggap kerabat (fictive kin) yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab.

Erat-tidaknya hubungan dengan anggota kerabat tergantung dari jenis kerabatnya dan lebih lanjut dikatakan Adams, bahwa hubungan dengan anggota kerabat juga dapat dibedakan menurut kelas sosial Ihromi (2004: 99). Hubungan dalam keluarga bisa dilihat dari Pertama, hubungan suami-istri. Hubungan antar suami-istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti: adat, pendapat umum, dan hukum. Kedua, Hubungan orangtua-anak. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orangtua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Ketiga, Hubungan antar-saudara (siblings). Hubungan antara saudara bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah anggota keluarga, jarak kelahiran, rasio saudara laki-laki terhadap saudaraperempuan, umur orang tua pada saat mempunyai anak pertama, dan umur anak pada saat mereka ke luar dari rumah.

Hubungan keluarga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hubungan pensiunan PNS dan anaknya. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Secara psikologis pensiunan akan bangga dengan prestasi yang di miliki anaknya, secara ekonomis, pensiunan menganggap anak adalah masa depan bagi mereka, dan secara sosial mereka yang menerima pensiunan ketika keadaan terpuruk dan menjadi benteng terdepan untuk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada. Keluarga bagi pensiunan PNS menjadi faktor utama sebagai salah satu alasan peningkatan kesejahteraan. Pensiunan sendiri melakukan usaha mereka ketika memasuki masa pensiun untuk mencapai apa yang diperlukan keluarganya. Tunjangan yang pada dasarnya hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat

mereka untuk berfikir menjalani pekerjaan lain agar tugas dan kewajiban pensiunan tersebut dapat dipenuhi. Mengingat pensiunan disini sebagai kepala keluarga tunggal yang memang berkewajiban memebuhi kebutuhan keluarganya.

## 2.5 Usaha Peningkatan Kesejahteraan Pensiunan PNS

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Di negara lain, istilah yang banyak digunakan adalah ‘*welfare*’ (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung Suharto (2005:2). Arthur Dunham dalam Sukoco (1991:3) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi (BPS,2005). Menurut BKKBN ada beberapa tahapan keluarga sejahtera. Secara rinci keberadaan Keluarga Sejahtera digolongkan ke dalam lima tingkatan sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal. Indikator kebutuhan dasar keluarga sejahtera adalah:
  - a. Spiritual  
Anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
  - b. Pangan

- Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
- c. Sandang  
Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda yang digunakan di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian.
  - d. Papan  
Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
  - e. Kesehatan  
Bila anak menderita sakit atau PUS ingin mengikuti KB dapat dengan mudah pergi ke petugas kesehatan atau Rumah Sakit.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti:
    - a. Kebutuhan Pendidikan
    - b. Keluarga Berencana
    - c. Interaksi dalam keluarga
  3. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
  4. Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
  5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Indikator yang dibuat BKKBN jika dikaitkan dengan pensiunan maka mereka bisa dikatakan keluarga sejahtera II dan keluarga sejahtera III. Hal ini didasarkan kondisi pensiunan yang belum bisa mengembangkan kondisi keluarganya sehingga melakukan pekerjaan baru ketika mereka memasuki pensiun. Kondisi keluarga tersebut yang memotivasi pensiunan untuk melakukan pekerjaan informal yang dilakukan sampai saat ini. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan,

dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Diakui atau tidak, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, bukanlah persoalan yang mudah. Disiplin ilmu kesejahteraan sosial mengarahkan bidang cakupannya kearah yang lebih luas. Midgley dalam Adi (2013: 23) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai:

*“A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized”.*

Definisi di atas mengatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Peningkatan kesejahteraan individu maupun keluarga berhak dilakukan oleh siapa pun dengan cara yang berbeda di setiap usaha yang dilakukan.

Peningkatan kesejahteraan PNS ketika pensiun dilakukan dengan jalan mencari pekerjaan baru yang sekiranya bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan pensiunan tersebut. Individu yang merasa perlu untuk meningkatkan kesejahteraan akan melakukan apa saja termasuk memasuki hal-hal baru yang menjadi kebiasaan baru juga untuk mereka. Salah satunya adalah pekerjaan informal yang dilakukan oleh beberapa pensiunan PNS di Kabupaten Madiun. Ketidakmampuan mereka untuk melakukan pekerjaan di sektor formal menjadikan mereka untuk bekerja di sektor informal. Mengingat peran mereka sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab penuh atas berlangsungnya kehidupan dan kesejahteraan keluarganya.

### 2.5.1 Pekerjaan Sektor Formal

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025, pada bagian Pengantar paragraph 1

disebutkan “Secara umum status pekerjaan utama dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) besaran yakni sektor formal (kegiatan ekonomi formal) dan sektor informal (kegiatan ekonomi informal). Jayadinata (1999) Pekerja sektor formal atau disebut pekerja manajerial (*white collar*) terdiri dari tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa. Untuk bekerja pada sektor formal biasanya membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai dan dikenai pajak. pekerja manajerial (*white collar*) yang merepresentasikan pekerja sektor. Pekerja *white collar* sering digambarkan sebagai pekerja yang lebih mengandalkan pengetahuan dan keterampilan mental dalam bekerja. *White collar Worker* ini kadang-kadang juga dianggap menduduki kelas yang lebih tinggi dalam tangga ketenagakerjaan. Sejauh ini pembagian klasik tersebut tampaknya berjalan begitu saja dan sepertinya dapat diterima oleh orang-orang yang menjalankannya.

Menurut Sindung Haryanto (2011:229) pekerjaan sektor formal (*white collar*) memiliki ciri yang sangat berbeda dengan pekerjaan informal. Ciri-ciri tersebut adalah :

1. Modal yang didapat sangatlah mudah diperoleh.
2. Teknologinya bersifat padat modal
3. Organisasi bersifat birokrasi yang memiliki arti bahwa sistemnya rasional atau struktur terorganisir dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan.
4. Negara sangat berperan aktif dalam berjalannya sektor ini.
5. Sangat tergantung kepada perlindungan pemerintah atau impor
6. Hubungan kerja berdasarkan kontrak kerja yang disepakati semenjak awal atau disesuaikan dengan aturan yang ada.

Pekerjaan sektor formal memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Sistem kerja dalam bidang ini lebih memiliki struktur (bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi). Pekerjaan formal harus memiliki tujuan atau sasaran. Tujuan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dibuat. Struktur

menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, atau pun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja.

Kerja adalah bagian sentral di dalam kehidupan manusia. Dengan pikiran dan tubuhnya, manusia mengorganisir pekerjaan, membuat benda-benda yang dapat membantu pekerjaannya tersebut, dan menentukan tujuan akhir dari kerjanya. Upaya pemenuhan tingkat kesejahteraan individu satu dengan individu yang lainnya berbeda sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Pengambilan keputusan untuk bekerja merupakan pilihan yang dianggap baik oleh seseorang. Pekerjaan formal (*White Collar Worker*) menjadi jenis pekerjaan pada waktu pensiunan aktif bekerja sebagai PNS. PNS masuk ke dalam pekerjaan formal karena untuk masuk dalam pekerjaan ini harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan dalam bekerja mereka memiliki landasan aturan yang harus dijalankan. Sehingga pekerjaan PNS sangat terstruktur terkait pelaksanaan karena mereka termasuk ke dalam Aparatur Sipil Negara.

### 2.5.2 Pekerjaan Sektor Informal

Istilah “sektor informal” pertama kali dikembangkan oleh Hart (1971), bermula dari penggambaran kehidupan angkatan kerja perkotaan yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Pengertian dari sektor pekerjaan yang kurang terorganisir itu mencakup pengertian yang seringkali diistilahkan secara umum dengan “usaha sendiri”. Suatu jenis pekerjaan yang sulit dicacah, karena itu sering dilupakan dalam sensus resmi, serta akhirnya merupakan kesempatan kerja yang persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum. Hasil dari *The 15<sup>th</sup> ICLS (Internasional Conference of Labour Statistician); ili 1993*

“Sektor informal secara luas merupakan unit produksi barang atau jasa dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja dan pendapatan.”

Menurut KBBI Pekerjaan Sektor Informal merupakan :

“Unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga maupun keahlian.”

Pekerjaan sektor informal dikaji dari pengertian diatas merupakan sebuah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tanpa perizinan tertentu dari pihak terkait. Dasar itulah yang kemudian didapatkan ciri-ciri sektor informal berdasarkan konsep ILO :

- a. Skala kecil, beroperasi pada level organisasi yang rendah
- b. Sedikit (atau tidak sama sekali) pembagian antar tenaga kerja dan modal sebagai faktor produksi, teknologi rendah/sederhana
- c. Modal kecil, milik keluarga, tidak membayar pajak/kontribusi keamanan sosial, tidak terdaftar di Pemerintahan, tidak berbadan hukum.
- d. Lokasi usaha tidak tetap, mudah dimasuki tenaga kerja, padat karya, kegiatan produksi barang dan jasa sangat bervariasi, pola kegiatan tidak teratur dan melayani golongan masyarakat tertentu/terbatas.
- e. Bersifat inovatif, berdasarkan kebutuhan konsumen terbatas, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perubahan.

Pendirian usaha informal yang kemudian dijadikan pekerjaan informal oleh kalangan tertentu untuk pemenuhan kebutuhannya. Berjalannya pekerjaan itu tentunya memerlukan legalitas untuk memperlancar pekerjaan informal. Menurut Keith Hart (antropolog, 1970) klasifikasi legalitas sektor informal dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Sah  
Dilihat dari struktur kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan primer dan sekunder seperti pertanian, industri, konstruksi yang berorientasikan pasar. Sedangkan usaha tersier dengan menggunakan modal yang relatif besar seperti transportasi, spekulasi barang-barang dagangan, kegiatan sewa menyewa. Distribusi kecil-kecilan seperti pedagang pasar, pedagang kelontong, kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar, pengangkut barang, agen atas

komisi dan penyalur. Jasa lain seperti pengamen, tukang semir, tukang cukur, pembuang sampah dan makelar. Transaksi pribadi seperti pinjam meminjam dan pengemis.

b. Tidak Sah

Dikatakan tidak sah apabila, jasa yaitu kegiatan perdagangan gelap, seperti penadah barang-barang curian, lintah darat (tukang kredit uang), perdagangan obat bius, pelacuran, mucikari, penyelundup, suap-menyuap, korupsi dan lain-lain. Selain hal-hal tersebut transaksi seperti pencopetan/pencurian, pemalsuan uang dan perjudian tidak masuk dalam pekerjaan informal.

Menurut Wirosardjono (1985:5), sektor informal dicirikan sebagai berikut; pola kegiatannya tidak teratur dalam artian baik waktu, permodalan maupun penerimaannya tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah, modal peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian, umumnya tidak mempunyai tempat usaha lain yang besar, dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama; serta tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya. Karakteristik yang melekat pada sektor informal bisa merupakan kelebihan atau kekuatannya yang potensial. Di sisi lain pada kekuatan tersebut tersirat kekurangan atau kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya (*growth constraints*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan sektor informal di Indonesia.

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kotemporer bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja. PNS yang sudah memasuki masa pensiun, meskipun sudah tidak lagi bekerja di

sektor formal, pekerjaan sektor informal menjadi pilihan lain untuk mencapai kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Ciri-ciri yang ada terkait dengan pekerjaan informal sangat mendukung untuk pensiunan. Mereka bebas melakukan pekerjaan tersebut karena tidak terikat lagi dengan aturan sehingga bisa menyesuaikan dengan keadaan pensiunan.

## **2.6 Dampak Sosial Ekonomi dari Pekerjaan Sektor Informal yang Dilakukan Oleh Pensiunan PNS**

Memasuki masa pensiun, PNS sudah tidak memungkinkan lagi untuk memasuki dunia kerja formal dikarenakan sesuai aturan Negara berkembang, untuk pekerjaan formal dibutuhkan usia produktif. Artinya dalam usia produktif, penduduk tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang rutin. Manusia dikatakan usia produktif, ketika penduduk berusia pada rentang 15-59 tahun. Sebelum 15 tahun, atau setelah 59 tahun tidak lagi masuk ke dalam usia produktif (BKKBN, 2015). Ketidakproduktifan ini tentunya mempengaruhi mereka dalam bidang pekerjaan karena sudah tidak leluasa mengingat kebanyakan dari usia non produktif memiliki fisik yang lemah. Sektor-sektor lain kemudian akan lebih memilih individu yang lebih produktif karena mereka masih memiliki peluang diatas usia non produktif untuk berkembang. PNS yang sudah memasuki masa non produktif kemudian dipaksa untuk pensiun dan tidak diperbolehkan untuk memasuki sektor formal.

Badan Kepegawaian Negara (2014) mengeluarkan tiga kategori batas usia pensiun PNS, yaitu 58 tahun bagi Pejabat Administrasi, 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan bagi Pejabat Fungsional berlaku batas usia pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. PNS pensiun ketika memasuki usia 58 tahun, meskipun usia tersebut masih dikatakan produktif, namun untuk menuju ke usia tidak produktif dibutuhkan waktu yang singkat yaitu 1 tahun. Sehingga kesempatan pensiunan untuk bekerja di sektor formal sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Di Indonesia, menurut Hidayat (1987), sudah ada kesepakatan tentang sebelas ciri pokok sektor informal, yaitu :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya, unit usaha tidak mempunyai unit usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya, kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor.
6. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasi juga relatif kecil.
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh pengalaman sambil kerja.
9. Pada umumnya, unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau memperkerjakan buruh berasal dari keluarga.
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak sah.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa kota berpenghasilan rendah kadang-kadang juga berpenghasilan menengah.

Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh PNS setelah pensiun menyebabkan munculnya pekerjaan informal. Secara garis besar menurut survey yang dilakukan oleh Sakernas, pekerjaan sektor informal muncul disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- a. Perbandingan antara jumlah pekerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang timpang.
- b. Sektor informal muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja.
- c. Rumitnya sistem perpajakan.
- d. Birokrasi perijinan yang berbelit-belit.
- e. Tingginya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis legal.

Sektor informal menduduki peringkat teratas dalam menyerap angkatan kerja. Hal ini karena *entry* ke sektor ini sangat mudah dan keahlian yang dibutuhkan sangat terbatas. Sektor informal ini tumbuh sebagai akibat dari lambatnya sektor formal

menyerap tenaga kerja. Petumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan sektor formal mengalami kesulitan menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja baru. Sektor informal secara ekonomi, sosial, dan politik mempunyai keunggulan dan kelemahan. Terlepas dari itu sektor ini sebenarnya memberi kontribusi terhadap perekonomian daerah. Memang pilihan untuk masuk ke sektor informal bukanlah yang terbaik tapi merupakan pilihan kedua yang terbaik. Daripada mengangu lebih baik masuk ke sektor ini walaupun dengan pendapatan yang tidak terlalu besar. Sebenarnya tidak semua yang terjun ke sektor ini karena alasan kemiskinan. Ada juga pengusaha yang sengaja masuk ke sektor ini karena tidak terlalu diganggu oleh masalah birokrasi yang mahal. Dalam hal hal tertentu sektor ini dapat menggalang kerja sama dengan sektor formal sehingga batas antara sektor informal dan sektor formal menjadi kabur.

Pada dasarnya fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif terhadap pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumarnonugroho T (1987:41-43) berpendapat bahwa fungsi kesejahteraan sosial terdiri dari :

1. Fungsi Penyembuhan dan Pemulihan (Curative/remedial dan rehabilitatif).  
Bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada. Disamping fungsi penyembuhan ada fungsi pemulihan (rehabilitatif) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dari dalam diri orang maupun anggota masyarakat. Fungsi penyembuhan dapat bersifat reperesif artinya bersifat menekan agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak menjalar.
2. Fungsi Pencegahan (Preventive)  
Dalam hal ini meliputi langkah-langkah unuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial yang baru, juga langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.
3. Fungsi Pengembangan (promotif, development)

Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara konkret.

4. Fungsi Penunjang (Suportif).

Fungsi ini menopang usaha lain agar dapat lebih berkembang meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan, program-program lainnya seperti bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan sebagainya.

Setiap aspek diatas menjadikan pekerjaan informal sebagai peningkatan kesejahteraan pensiunan PNS. Dimulai ketika pekerjaan Informal menjadi solusi untuk merubah kondisi dan status mereka ini memposisikan pekerjaan tersebut sebagai upaya pemulihan dari pensiunan. Pekerjaan Informal juga digunakan sebagai salah satu pencegah terhadap kebutuhan mendadak misalkan saja sakit. Selain hal tersebut yang dilakukan Pensiunan PNS setelah pekerjaan itu berjalan adalah mengembangkan usaha tersebut dengan menggunakan fungsi penunjang untuk mendukung pengembangan yang dijalankan.

Lapangan kerja yang tidak memadai, menjadikan masyarakat yang tidak mendapatkan tempat pada sektor formal akan beralih ke sektor informal yang tidak menuntut banyak keahlian dan pendidikan yang memadai. Pekerja sektor informal dari segi umur tidak memiliki batasan, sepanjang mereka masih mampu dan bersedia untuk bekerja. Bahkan anak-anak yang belum layak untuk bekerja bisa memasuki bidang ini demikian juga dengan mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Peralihan menjadi pekerja formal menjadi pekerja formal menjadi hal baru dan mereka di haruskan untuk beradaptasi dengan keadaan sekitar. Mengingat pekerjaan formal kegiatan usaha yang bentuknya terorganisasi, cara kerjanya teratur dan pembiayaannya dari sumber resmi sedangkan informal kegiatannya lebih bebas dan tidak terikat dengan pemerintahan sehingga Pensiunan PNS dalam bekerja di bidang ini tidak harus memenuhi syarat tertentu hanya mengandalkan kemampuan dan sumber daya yang telah dimiliki.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berfungsi memberi landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan informasi-informasi pendukung sebuah penelitian, maka dalam penelitian harus ada data pembanding untuk melengkapi informasi-informasi pendukung tersebut. Penelitian terdahulu bisa digunakan untuk mencari letak perbedaan dan kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti dulu dengan peneliti yang akan meneliti. Peneliti mengambil perbandingan penelitian dari 3 orang peneliti lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Wahyu Lestari (2014) Universitas Jember lebih menekankan kepada Kegiatan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dihari tuanya (Studi Deskriptif pada 4 orang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang dilakukan pensiunan PNS saat ini sudah tidak lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri, karena pensiunan ingin mempunyai kegiatan yang positif apalagi yang dilakukan agar kebutuhan ekonomi maupun sosial terpenuhi. Dinilai badan masih sehat, maupun pensiunan ini melakukan berbagai tindakan ekonomi, afektif maupun sosial selain untuk menambah penghasilan keluarga juga untuk menghilangkan kebosanan. Kegiatan yang dilakukan membuat pensiunan merasa senang melewati masa tuanya, dan tidak jenuh menghabiskan hari tuanya.

Penelitian yang berjudul “Kebermaknaan Hidup Pegawai dalam Menghadapi Pensiun” yang dilakukan oleh Ainabila Kintaninani (2013) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hasil penelitian menyatakan bahwa kedua informan pegawai yang akan menjalani pensiunnya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah selama kurang lebih 6 bulan melakukan hal-hal yang bersifat mendekatkan diri dengan keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan seperti membantu anak, dan mengikuti kegiatan yang ada di dalam masyarakat karena fase yang dialami kedua informan adalah fase bulan madu yaitu fase terawal dari pensiun. Kesamaan dari

kedua informan tersebut adalah bentuk keluarga, maupun riwayat pencapaian mereka yang didapatkan dari dasar hingga tingkatan puncak.

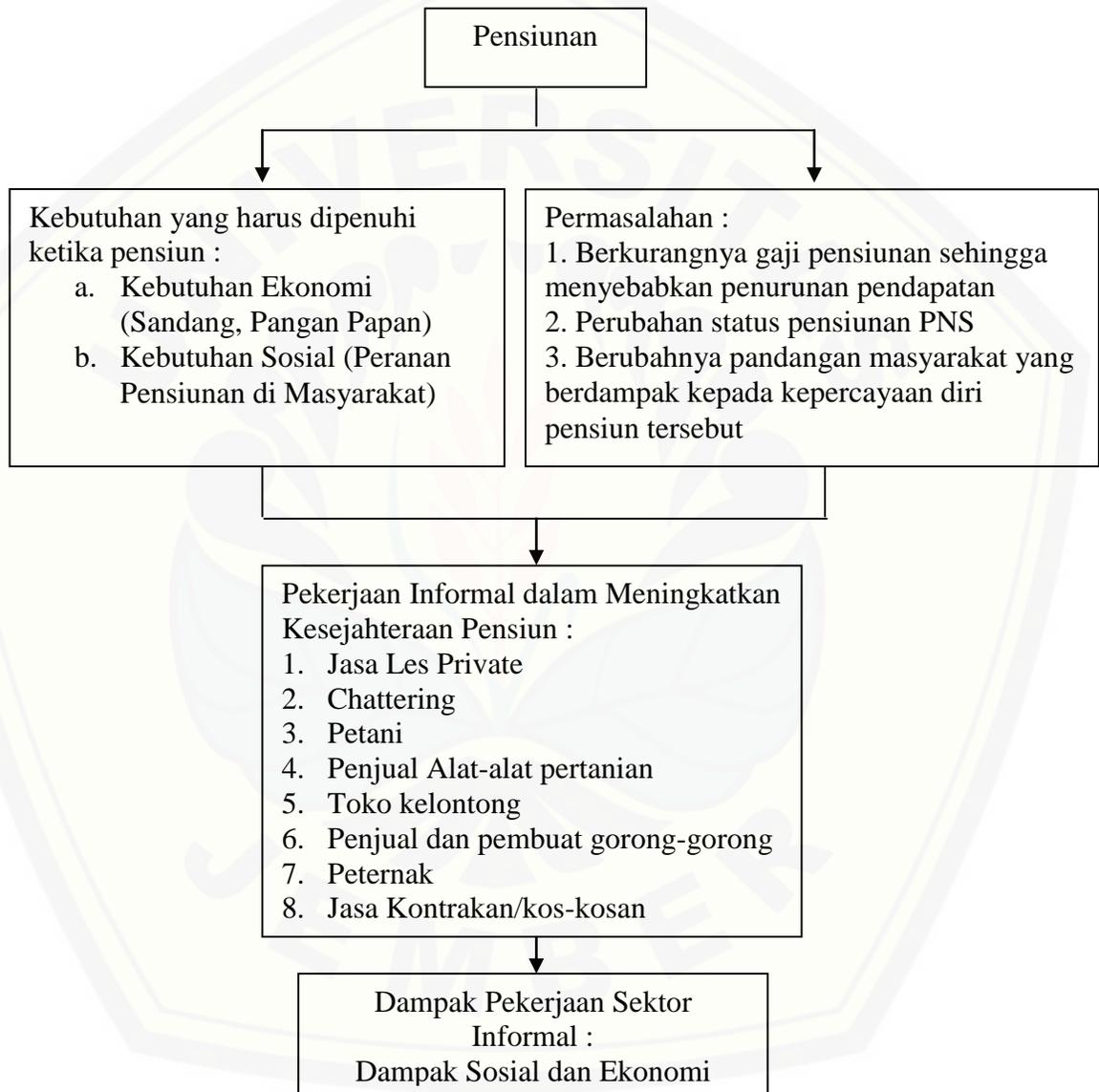
Penelitian yang berjudul “Perbedaan Tingkat Kecemasan Menghadapi Pensiun Antara Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Mempunyai Pekerjaan Sampingan Dan Mempunyai Pekerjaan Sampingan Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Ponorogo” oleh Wahyu Tri Ratnasari (2009) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang berisi perbedaan tingkat kecemasan menghadapi pensiun yang sangat signifikan antara pegawai negeri sipil yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan dan mempunyai pekerjaan sampingan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Ponorogo. Pegawai negeri sipil yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan mempunyai tingkat kecemasan menghadapi pensiun lebih tinggi daripada pegawai negeri sipil yang mempunyai pekerjaan sampingan.

Pada setiap penelitian akan ditemukan perbedaan yang muncul, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Namun, peneliti menggunakan acuan yang sama yaitu menggunakan pensiun PNS sebagai objek penelitian meskipun dengan permasalahan yang berbeda antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian terdahulu diatas sangat membantu peneliti sekarang dalam proses pencapaian tujuan. Proses pensiunan untuk menjalankan kehidupan menjadi penentu utama dalam ketiga penelitian itu, namun untuk peneliti yang akanmeneliti sekarang lebih mengutamakan bagaimana pensiunan tersebut mencukupi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan dirinya maupun keluarganya dengan memanfaatkan kemampuan yang didapatkan pada saat mereka masih menjadi PNS. Salah satunya dengan memanfaatkan pekerjaan sektor informal yang sangat berpengaruh untuk mencapai kesejahteraan mereka ketika menjadi seorang pensiunan.

## **2.8 Kerangka Fikir**

Kerangka adalah sesuatu yang menyusun atau menopang yang lain, sehingga sesuatu yang lain dapat berdiri, dan Berpikir merupakan gerak akal dari satu titik ke titik yang lain. Kerangka pikir dan alur pikir ilmiah merupakan model konseptual

tentang bagaimana Teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Berikut merupakan kerangka pikir dalam penelitian ini.



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

PNS (Pegawai Negeri Sipil) ada saatnya mereka mengalami masa pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa dari pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Keadaan sebagai pensiun tidak selamanya bisa memberikan kesejahteraan bagi diri pensiunan. Ini dikarenakan sebagian dari mereka masih memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi dan tidak bisa hanya dicukupi dengan tunjangan yang ada. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan sosial (berkumpul, memperbaiki keberfungsian pensiunan). Setiap kebutuhan tentunya berbeda dari individu satu dengan yang lainnya. Tetapi dua kebutuhan tersebut adalah hal yang mendasar yang memang harus dipenuhi oleh diri pensiunan.

Keadaan tunjangan yang memang tidak begitu besar, tentunya dari kebutuhan menimbulkan beberapa permasalahan antara lain usia yang sudah tidak mumpuni untuk masuk ke pekerjaan bidang formal dan kebutuhan yang semakin meningkat dengan tunjangan yang minim. Adanya asuransi sosial dirasa kurang untuk membiayai kehidupannya ketika mereka pensiunan. Sisi lain penghasilan mereka jauh berkurang dibandingkan dulu ketika mereka masih bekerja, apalagi mereka sebagai kepala keluarga masih dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dari itu untuk mencukupi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan pensiun yang sebagian permasalahannya terletak pada kebutuhan yang harus dipenuhi, pensiun melakukan upaya pemenuhan dengan bekerja di sektor informal. Mengingat umur mereka yang sudah tidak muda lagi, dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk masuk ke pekerjaan sektor formal. Pekerjaan baru ini tentunya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan mereka pada saat pensiun.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Pemahaman akan pentingnya metodologi penelitian (research methods), menjadikan bidang ilmu itu akan semakin diminati. Hal ini dipicu oleh permasalahan yang semakin kompleks di dalam kehidupan manusia. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Sugiono (2011:2). Proses menemukan kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, menggunakan metode penyelidikan/penelitian ilmiah yang berarti untuk menjelaskan fenomena, dibutuhkan suatu prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian, membantu peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab suatu permasalahan. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang diperoleh di dalam penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Dalam berbagai literatur, penelitian sosial diperkenalkan dengan dua pendekatan, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, dimana masing-masing pendekatan memiliki prosedur penelitian yang berbeda. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2012:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*). Hal ini diperkuat oleh Irawan (2006:52) metode penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik dan berhubungan dengan sifat data yang murni. Peneliti diharapkan bisamendapatkan

hasil yang benar-benar merupakan kondisi yang sebenarnya atau alamiah atas apa yang menjadi objek penelitian. Uraian yang mendalam juga bisa didapatkan dari peneliti melalau ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati secara langsung dengan sudut pandang yang utuh.

Penggunaan metode penelitian kualitatif, digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, sehingga peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan data. Metode penelitian kualitatif ini berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa, interaksi, tingkah laku manusia maupun fenomena tertentu dari perspektif peneliti sendiri. Dalam penelitian dengan metode ini, peneliti lebih memfokuskan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang mengutamakan proses dibandingkan hasil akhir, atau lebih tepatnya dalam penelitian kualitatif menyelidiki makna dari fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini dipandang paling tepat untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mendeskripsikan bagaimana Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun dalam Kesejahteraannya dengan memanfaatkan pekerjaan informal yang mereka ciptakan setelah mereka tidak aktif bekerja. Penelitian ini memandang realita dari kondisi pensiunan PNS tepatnya di Kabupaten Madiun yang pada saat memasuki masa pensiun merasa kesulitan dalam kesejahteraan. Disisi lain usia yang sudah tidak muda lagi sehingga lapangan pekerjaan pun terbatas atau bahkan tidak bisa memasuki dunia pekerjaan formal lagi karena usia memang sudah tidak mendukung. Dari hal tersebut peneliti ingin mendiskripsikan mengenai pekerjaan informal dalam kesejahteraan pensiunan PNS tersebut.

Berdasarkan apa yang ada di latar belakang dan tujuan penelitian maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bungin (2001:48) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, berupaya menarik realitas itu di permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, data atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Sedangkan penelitian deskriptif

menurut Faisal (2005:21) dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian deskriptif disini merupakan suatu pendekatan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan berusaha tidak memisahkan hal-hal tersebut ke dalam beberapa variable.

Peneliti memilih untuk menggunakan studi diskriptif karena untuk menemukan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain dan menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Permasalahan pensiunan dalam mencapai kesejahteraanya dirasa masih bisa terselesaikan karena selama mereka bekerja memiliki gaji yang cukup besar dan setelah tidak bekerja masih memiliki tunjangan perbulan yang jumlahnya hanya berkurang setengahnya. Seharusnya dengan tunjangan yang cukup besar, pensiunan bisa menikmati pensiun tanpa harus melakukan pekerjaan lain. Namun keadaan berbeda justru ditunjukkan oleh beberapa informan yang merasa bahwa mereka masih kekurangan atau mengalami kesulitan untuk mencapai kesejahteraanya. Atas dasar itulah mereka menggunakan pekerjaan sektor informal untuk meningkatkan kesejahteraanya.

### **3.2 Penentuan Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian Moleong (2012:127) menyatakan cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Peneliti memilih lokasi ini dengan pertimbangan pertama, di daerah tersebut terdapat cukup banyak pensiunan yang mengalami berbagai macam usaha di bidang informal (pedagang, jasa, beternak) untuk mencapai kesejahteraannya setelah tidak aktif bekerja .

Kedua, pekerjaan sektor informal memiliki jumlah tertinggi diantara pekerjaan yang lainnya yaitu 259.779 jiwa (BPS 2014) yang di dalamnya termasuk pensiunan PNS. Sehingga pekerjaan sektor informal masih menjadi pekerjaan yang favorit dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya.

Penentuan lokasi tersebut karena peneliti juga tertarik dengan pola pikir pensiunan PNS sebagian besar masih mempertahankan budaya “*abot anak tinimbang telak*” yang memiliki arti lebih mementingkan kebutuhan anak dibandingkan dengan kebutuhannya sendiri. Pensiunan disini masih memiliki pemikiran bahwa mereka masih tetap menghidupi atau menjadi tulang punggung anaknya, meskipun mereka sudah berkeluarga. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Madiun. Tahun 2015 menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 189 orang di daerah Madiun mengalami purna tugas atau pensiun. Kebanyakan dari mereka berasal dari tenaga pendidik mulai dari guru SD sampai dengan SMA.

### 3.3 Metode Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian oleh Moleong (2012:132). Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti. penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial dalam kasus yang dipelajari. Sugiyono (2012:50) menyatakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Informan dalam penelitian mempunyai peranan yang sangat penting.

Teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian Sugiyono (2012:52). Metode penentuan informan yang dilakukan peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan

dengan menggunakan teknik *purposive* dalam penentuannya, peneliti sudah memiliki kriteria dalam penentuan informan sehingga peneliti dapat menetapkan informan yang dianggap mampu melengkapi data-data peneliti. Mukhtar (2013:94) menjelaskan *purposive* adalah peneliti menetapkan lebih awal siapa saja yang menjadi sampelnya, dan menyebutkan statusnya masing-masing sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitian. Prinsipnya dalam *purposive sampling* ini harus mewakili unsur subjek yang ditetapkan dalam sebuah situasi sosial, agar data yang dihimpun dapat terwakili dari seluruh karakter yang ada dalam situasi sosial penelitian yang dilakukan informan.

Penggunaan *purposive* diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya terkait dengan pekerjaan Informal pensiunan PNS di Kabupaten Madiun. Menurut Burhan Bungin (2007:108), informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu informan pokok dan informan tambahan.

#### 1. Informan Pokok (Primary Informan)

Pada penelitian ini penentuan informan pokok berfungsi sebagai sumber data utama. Informan pokok ini berfungsi sebagai sumber untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan pokok ditetapkan sebagai subjek penelitian yang ditentukan, hal ini ditujukan untuk mendapat data yang diharap dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Mukhtar (2013:91) menjelaskan informan adalah orang yang dijadikan sandaran untuk melakukan *cross check* data atau proses triangulasi sumber. Keberadaan informan pokok sebagai sumber data utama dalam penelitian membuat peneliti memiliki kriteria dalam tahapan panggilan informasi lebih mendalam. Menurut Spradley dalam Moleong (2012:165), informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- a. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- b. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
- c. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Adapun kriteria yang menjadi informan pokok dari pihak terkait adalah sebagai berikut :

- 1) Subjek yang mengetahui bagaimana pekerjaan informal itu dilakukan.
- 2) Subjek yang terlibat secara penuh, aktif dan mengetahui kegiatan yang menjadi fokus peneliti yaitu tentang pekerjaan informal pensiunan PNS yang dijadikan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pensiunan tersebut.
- 3) Subjek yang bersedia menjadi informan

Dari kriteria yang disampaikan, peneliti mencoba mengidentifikasi informan pokok yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a) Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun tahun 2014 golongan III : Pensiunan menjadi informan pokok yang karena dalam fenomena ini pensiunan sebagai pelaku utama untuk melakukan pekerjaan informal. Subjek yang terlibat secara penuh, aktif dan mengetahui kegiatan yang menjadi fokus peneliti yaitu tentang pekerjaan informal pensiunan PNS yang dijadikan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pensiunan tersebut. Penentuan golongan dikarenakan pada golongan tersebut, termasuk golongan terendah yang ada pada tahun 2014.

Informan pokok yang telah dipilih mampu memberikan informasi atau data terkait secara faktual dan akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Sehingga peneliti dapat mengetahui dan bisa menggambarkan pekerjaan sektor informal dalam kesejahteraan pensiunan PNS di Kabupaten Madiun. Berdasarkan kriteria dan alasan penentuan informan di atas, maka informan yang masuk dalam kriteria tersebut adalah 10 orang informan pokok yang merupakan pensiunan PNS. Berikut adalah deskripsi informan secara umum yaitu :

**(1) Ellyanti**

Informan Ellyanti merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal sebagai penjual lontong sayur dan rujak di depan rumahnya selama 2 tahun. Beliau menjadikan pekerjaan informal sebagai pekerjaan utama ketika pensiun sebagai PNS di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Madiun. Informan saat ini berusia 60 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah sarjana (S1) jurusan ekonomi.

**(2) Sutrisno**

Informan Sutrisno merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal sebagai wirausaha penyewaan becak cinta dan les b.inggris yang dilakukan setiap hari senin-rabu di rumahnya. Beliau menjadikan pekerjaan informal penyewaan becak cinta sebagai pekerjaan utama ketika pensiun sedangkan pekerjaan sebagai guru private terkadang digantikan oleh anaknya. Sebelum pensiun beliau bekerja menjadi seorang guru SD yang biasanya mengajar kelas 5 & 6. Informan saat ini berusia 61 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah sarjana (S1) jurusan pendidikan Sekolah Dasar.

**(3) Sudarto**

Informan Sudarto merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal sebagai

peternak ayam. Beliau menjadikan pekerjaan informal tersebut sebagai pekerjaan utama ketika pensiun. Sebelum pensiun beliau bekerja menjadi pegawai negeri sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun. Informan saat ini berusia 59 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMA Akuntansi.

**(4) Sudarno**

Informan Sudarno merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal sebagai pedagang kebutuhan pokok dengan membuka toko disamping rumahnya. Beliau menjadikan pekerjaan informal tersebut sebagai pekerjaan utama ketika pensiun tetapi dia juga menggunakan kemampuannya untuk bertani ketika musim tanam tiba. Sebelum pensiun beliau bekerja menjadi penyuluh pertanian Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun. Informan saat ini berusia 60 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sarjana (S1) Pertanian.

**(5) Sutiati**

Informan Sutiati merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal sebagai guru les atau bimbingan belajar dimana tempat beliau dulu mengajar karena di tempat beliau bekerja masih dibutuhkan guru ahli B.Indonesia . Beliau menjadikan pekerjaan informal tersebut sebagai pekerjaan utama setelah pensiun meskipun gajinya jauh berbeda dari sebelumnya. Sebelum pensiun beliau bekerja menjadi guru Bahasa Indonesia di SMAN 1 Mejayan. Informan saat ini berusia 59 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sarjana (S1) pendidikan Bahasa Indonesia.

**(6) Masrikah**

Informan Marikah merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal di bidang chattering/pesanan nasi kotak. Beliau menjadikan pekerjaan informal

tersebut sebagai pekerjaan utama ketika pensiun dengan sistem baru melakukan pekerjaan tersebut ketika ada pesanan. Sehingga penghasilan tidak menentu tetapi setidaknya bisa menambah pemasukan. Sebelum pensiun beliau bekerja sebagai guru SMAN 2 Mejayan. Informan saat ini berusia 59 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sarjana (S1) Pendidikan Ekonomi.

**(7) Martiati**

Informan Martiati merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal sebagai penyewa Kontrakan. Beliau menjadikan pekerjaan informal tersebut sebagai pekerjaan utama ketika pensiun karena masih banyak kebutuhan yang harus dicukupi dan adanya peluang yang baik digunakan untuk membangun kontrakan. Sebelum pensiun beliau bekerja menjadi pegawai negeri sipil Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun. Informan saat ini berusia 60 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sarjana (S1) Teknik Pertanian.

**(8) Suyitno**

Informan Suyitno merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal sebagai Petani Padi. Beliau menjadikan pekerjaan informal tersebut sebagai pekerjaan utama ketika pensiun karena masih ada 1 anak yang harus dipenuhi kebutuhannya meskipun anak tersebut tidak sekolah. Sebelum pensiun beliau bekerja menjadi pegawai negeri sipil menjadi sekretaris Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Informan saat ini berusia 59 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMA.

**(9) Heri**

Informan Heri merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal sebagai Penjual dan pembuat beton/gorong-gorong. Beliau menjadikan pekerjaan informal

tersebut sebagai pekerjaan utama ketika pensiun karena masih ada 2 anak yang harus dipenuhi kebutuhannya pendidikannya. Sebelum pensiun beliau Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Madiun. Informan saat ini berusia 58 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sarjana (S1) Komunikasi.

**(10) Sarbini**

Informan Sarbini merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang saat ini melakukan pekerjaan sektor informal sebagai wirausaha alat-alat pertanian. Beliau menjadikan pekerjaan informal tersebut sebagai pekerjaan utama ketika pensiun bersama dengan menantu dan istrinya saling berbagi tugas. Sebelum pensiun beliau Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun. Informan saat ini berusia 60 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMA.

2. Informan Tambahan (Secondary Informan)

Informan tambahan menurut Suyanto dan Sutinah (2005:172) adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan biasanya orang yang dianggap tahu tentang kejadian-kejadian yang ada (masih berhubungan dengan data pokok penelitian) yang dialami oleh informan pokok. Peneliti mencoba mengidentifikasi informan tambahan yang dibutuhkan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. BKD Kabupaten Madiun merupakan badan kepegawaian yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberikan tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan kepegawaian pada umumnya. BKD secara langsung mengerti berapa jumlah PNS yang mengalami purna tugas pada tahun 2014 dan bagaimana keadaan pensiunan yang ada di Kabupaten Madiun.

- b. Keluarga Pensiunan PNS : keluarga disini mempunyai informasi tentang bagaimana pensiunan tersebut bekerja disektor informal untuk mencapai kesejahterannya.
- c. Pekerja yang bekerja di pekerjaan Informal pensiunan PNS dan tetangga ataupun saudara dari pensiunan PNS.
- d. Pensiunan PNS yang tidak melakukan pekerjaan informal sebagai perbedaan antara pensiunan yang memiliki pekerjaan atau tidak. Dalam hal ini peneliti lebih memilih mereka yang memiliki golongan PNS dibawah IV.

Adapun deskripsi informan tambahan dalam penelitian ini adalah :

**(1) Krisna**

Informan Krisna merupakan anak terakhir dari Bapak Sutrisno yang mengetahui bagaimana Informan Sutrisno bekerja pada sektor Informal. Krisna disini sebagai anak yang ikut membantu dan ikut serta dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Bapaknya pada saat pensiun sehingga mengerti secara langsung bagaimana usaha bapaknya untuk meningkatkan kesejahteraannya pada saat pensiun. Informan Krisna saar ini berusia 35 tahun dan pendidikan terakhir adalah Sarjana (S1) Bahasa Inggris.

**(2) Sikal**

Informan Sikal ini merupakan anak dari Informan suyitno yang menjadi alasan kenapa beliau melakukan pekerjaan informal adalah untuk mencukupi kebutuhan dari Sikal. Sehingga Informal Sikal mengerti bagaimana bapaknya bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mengingat kondisi dari Informan Sikal yang pengangguran dan sesekali membantu Informan Suyitno melakukan pekerjaannya sebagai petani. Usia informan pada saat ini adalah 24 tahun dan pendidikan terakhir adalah SMA.

**(3) Isni**

Informan Isni merupakan menantu dari Informan Sarbini yang ikut serta dalam pekerjaan yang dilakukan oleh bapak Sarbini. Pada awalnya dia merupakan pegawai disalah satu perusahaan swasta di Madiun dan kemudian keluar dari pekerjaan tersebut yang sekarang membantu pekerjaan mertuanya sebagai wirausaha alat-alat pertanian. Informan Isni pada saat ini berusia 31 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah D3 Perpajakan.

**(4) Dwi**

Informan Dwi merupakan pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun yang mengerti berapa jumlah PNS yang mengalami purna tugas pada tahun 2014 dan bagaimana keadaan keseluruhan PNS di Kabupaten Madiun pada tahun tersebut. Informan Dwi merupakan pegawai yang bekerja pada bidang khusus terkait pensiunan sehingga bisa dijadikan sumber yang terpercaya untuk peneliti. Informan Dwi pada saat ini berusia 35 tahun dan pendidikan akhir yang ditempuh adalah Sarjana (S1) komunikasi.

**(5) Ani**

Informan Ani merupakan tetangga dan sekaligus pekerja dari Informan Ellyanti. Tugas yang dilakukan adalah membantu menjaga warung dari ibu Ellyanti sehingga Informan Ani mengetahui seperti apa struktur berjalannya pekerjaan Informan Ellyanti ini. Pekerjaan dimulai dari jam 8-4 sore dan untuk hari sabtu-minggu libur. Saat ini usia informan Ani adalah 45 tahun dan pendidikan akhir yang ditempuh adalah SMP.

**(6) Sulaiman**

Informan Sulaiman merupakan tetangga dekat dari Informan Sudarto yang memiliki usaha peternakan ayam lebih dulu dibandingkan bapak Sudarto. Sebelum Informan Sudarto melakukan usaha tersebut, terlebih dahulu meminta arahan dari Informan Sulaiman ini mengingat beliau

lebih pengalaman. Secara tidak langsung informan Sulaiman juga ikut serta dalam proses Informan Sudarto melakukan pekerjaan ini. Usia informan Sulaiman adalah 41 Tahun dan pendidikan akhir adalah SMA.

**(7) Aini**

Informan Aini merupakan pekerja dari Ibu Masrikah yang ketika ada pesanan, dia dipanggil untuk membantu Ibu Masrikah. Pada saat Informan Aini ini melakukan pekerjaannya, tidak jarang juga Informan Masrikah berbagi cerita mengenai kehidupannya sekarang. Usia informan Aini ini adalah 26 tahun dan pendidikan akhir yang ditempuh adalah SMA.

**(8) Baron**

Informan Baron merupakan pekerja dari Bapak Heri yang setiap harinya selalu bertemu dan bekerja dengan informan Heri. Baron bisa dibilang cukup dekat dengan informan Heri karena selain pekerja dia memiliki rumah yang berhadapan dengan informan Heri. Dari awal berdirinya usaha tersebut, baron merupakan pekerja tetap yang mengikuti Informan heri. Usia informan baron adalah 34 tahun dan pendidikan akhir yang ditempuh adalah SMA.

**(9) Suprpto**

Informan Suprpto merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang tidak melakukan usaha meningkatkan keajahteraan ketika pensiun. Informan ini hanya mengandalkan tunjangan pensiun dan Sebelum pensiun beliau bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Madiun. Informan saat ini berusia 60 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S1 Pertanian.

**(10) Gunawan**

Informan Gunawan merupakan pensiunan PNS tahun 2014 Kabupaten Madiun yang tidak melakukan usaha meningkatkan keajahteraan ketika pensiun. Informan ini hanya mengandalkan tunjangan pensiun dan

Sebelum pensiun beliau bekerja di Kantor Kelurahan Wungu Kabupaten Madiun. Informan saat ini berusia 61 tahun dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMA.

Pertimbangan peneliti untuk mencantumkan karakteristik tersebut adalah rata-rata pada usia tersebut informan pokok sudah mengalami masa pensiun dan yang mampu memberikan informasi terkait keadaan atau situasi sosial yang dialami atau pengalaman dan kejadian-kejadian di lapangan yang berhubungan dengan penelitian. Latar belakang hubungan juga menjadi karakteristik informan hal ini sebagai pembeda antara informan pokok dan informan tambahan yang sangat dekat dan mengerti bagaimana pensiunan melakukan pekerjaan sektor informal untuk mencapai kesejahteraannya. Untuk karakteristik pekerjaan menandakan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang berhubungan secara langsung dengan informan pokok sehingga mereka secara langsung mengerti keadaan pensiunan dalam bekerja di sektor informal. Terkecuali dengan informan tambahan yang berasal dari BKD, karakteristik hubungan dan pekerjaannya digunakan untuk memperoleh data resmi dari instansi tersebut. sehingga peneliti benar-benar mendapatkan data akurat terkait dengan pensiunan PNS tahun 2014.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2011:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

### 3.4.1 Metode Observasi

Teknik ini digunakan untuk merekam data-data primer yang berupa peristiwa atau situasi sosial tertentu pada lokasi penelitian, yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun instrument yang digunakan adalah catatan-catatan lapangan yaitu melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Bungin (2007:115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
2. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
3. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Observasi partisipasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung artinya peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan informan, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. Selain itu metode ini digunakan oleh peneliti dengan menghimpun data penelitian dari pengamatan tersebut sehingga diperoleh hasil yang benar-benar diinginkan oleh peneliti.

Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, peneliti lebih memfokuskan dirinya sebagai pengamat sosial yang terkadang juga ikut masuk dalam kegiatan yang dilakukan oleh pensiunan tersebut. Observasi ini dilakukan selama dua bulan dengan mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun terlebih dahulu untuk mendapatkan data terkait dengan pensiunan di Kabupaten Madiun. Setelah proses selama 2 minggu data pensiunan didapatkan beserta informasi keadaan umum pensiunan yang ada di

Kabupaten Madiun. Kemudian dari data tersebut peneliti langsung mendatangi satu persatu dimulai dari data yang pertama dengan alamat yang sudah tertera di dalam data tersebut. Peneliti memilih pensiunan PNS yang memiliki pekerjaan Informal sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dan aktivitas pekerjaan Informal PNS masih dilakukan atau berlangsung hingga saat ini.

#### 3.4.2 Metode Wawancara

Selanjutnya Esterberg dalam Sugiyono (2011:233) menyatakan bahwa :

*“interviewing is at the heart of social research. If you look through almost any sociological journal. You will find that much social research is based on interview, either standardized or more in-depth”.*

Interview merupakan hatinya penelitian sosial. Bila Anda lihat dalam ilmu sosial, maka akan Anda temui semua karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara.

Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pensiunan PNS dan keberhasilan kegagalan usaha tersebut. Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Peneliti lebih memilih untuk menggunakan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang

ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variable apa yang harus diteliti.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau terbuka, yaitu wawancara dengan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dengan pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas, informan dapat memberikan asumsi atau menafsirkan sesuatu seputar perilaku. Proses kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan di masing-masing tempat, diharapkan data yang diperoleh semakin terfokus. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau diharapkan.

Wawancara tidak terstruktur peneliti lakukan kepada informan pokok dan informan tambahan untuk mendapatkan data terkait fokus penelitian, yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dilakukan ketika jam kerja antara pukul 08.00-12.00 dan 13.00-16.00 ini dilakukan setiap hari kerja. Untuk hari jum'at peneliti tidak melakukan wawancara karena pada hari itu, pensiunan memiliki waktu pendek karena mereka memilih memfokuskan waktunya untuk beribadah. Untuk hari sabtu dan minggu merupakan hari libur bagi pensiunan PNS, kecuali mereka yang bekerja di bidang perdagangan seperti toko kelontong dan toko alat pertanian. Ini juga dimaksudkan agar peneliti juga bisa mewawancarai keluarga atau pekerja yang ikut serta dalam usaha pensiunan tersebut. Terkadang jangka waktu antara jum'at sampai minggu, banyak diantara mereka yang memilih untuk libur sehingga apabila peneliti memilih waktu tersebut dipastikan tidak bisa mengetahui secara mendalam apa yang menjadi usaha pensiunan tersebut.

### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi di sini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, buletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen

pribadi dan dokumen resmi. Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis atau film oleh Moleong (2012:161). Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong 2012:161) “dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.”

Dokumen menurut Sugiyono (2011:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara atau metode di mana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada, baik itu data mengenai penduduk, sosial dan budaya maupun data kondisi daerah. Data yang didapatkan tersebut dapat pula untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan saat wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini dengan menelaah sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi dengan jalan melihat, mencatat dan sebagaimana yang sekiranya dapat menunjang dan menjelaskan data-data di lapangan yang berhubungan dengan bahasan penelitian ini.

Dokumentasi yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai pensiunan PNS di Kabupaten Madiun. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto. Peneliti memfokuskan untuk mengambil dokumentasi terhadap pekerjaan informal yang dilakukan oleh pensiunan tersebut, apa saja dan siapa saja yang ikut serta dalam pekerjaan tersebut tentunya pada saat jam kerja sehingga proses pekerjaan tersebut dapat terlihat oleh peneliti.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2012:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Peneliti menggunakan Irawan (2006:76) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, melalui wawancara kepada informan pokok dan informan tambahan, observasi lapangan di daerah Kabupaten Madiun, kajian pustaka berupa pengumpulan dokumen-dokumen penunjang data penelitian. Pada tahap ini peneliti menggunakan alat-alat yang perlu untuk mencatat keadaan atau wawancara, kemudian *handphone* sebagai *recorder* dan kamera.

2. Transkrip Data

Setelah data mentah yang diperoleh ketika penelitian terkumpul, data tersebut diubah menjadi bentuk tertulis, baik yang berasal dari *handphone* yang berupa rekaman suara maupun catatan tangan. Peneliti merubah catatan ke bentuk tertulis (baik yang berasal dari hasil rekaman wawancara atau catatan tulisan tangan) yang sesuai dengan informan dan waktu wawancara. Semuanya diketik persis seperti apa adanya tanpa mencampuradukan dengan pendapat dan pikiran peneliti.

3. Pembuatan Koding

Tahapan selanjutnya adalah membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada beberapa bagian tertentu dari hasil transkrip, peneliti akan menemukan hal-hal penting yang kemudian dicatat untuk proses selanjutnya. Hal-hal tersebut, dapat diambil kata kuncinya dan kata kunci inilah yang kemudian diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, data penelitian akan disederhanakan dengan cara menghubungkan konsep atau kata kunci dalam suatu ruang lingkup yang dinamakan kategori. Jadi, dari misalnya 65 kata-kata kunci peneliti mungkin akan merangkakannya menjadi misalnya 12 kategori.

5. Penyimpulan Sementara

Setelah selesai mengkategorikan data, kesimpulan dapat diambil, akan tetapi sifatnya masih sementara dan kesimpulan tersebut harus berlandaskan data penelitian serta tidak boleh dicampur dengan penafsiran sendiri dan pemikiran sendiri. Penyimpulan berdasarkan data-data di lapangan yang berdasarkan fokus penelitian mengenai pekerjaan sektor informal dalam kesejahteraan pensiunan PNS di Kabupaten Madiun

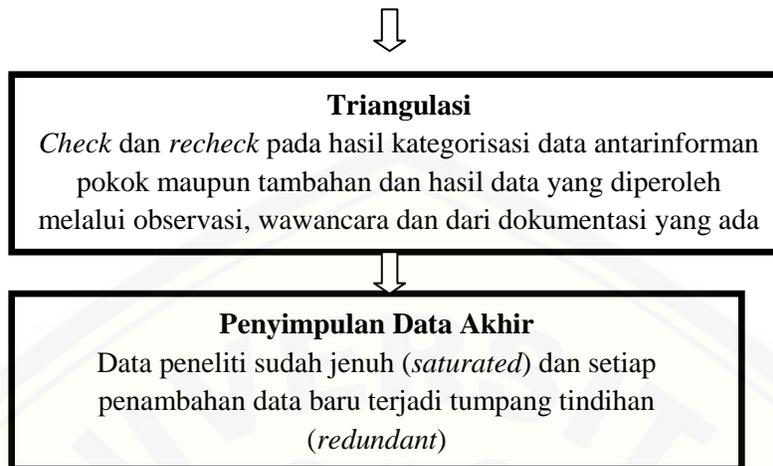
#### 6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check* dan *Re-check* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Pada proses ini, akan diperiksa kembali data penelitian karena beberapa kemungkinan dapat terjadi. Pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dari sumber lain tetapi tidak harus bertentangan. Ketiga, satu sumber bertolak belakang dengan sumber lain. Peneliti melakukan *check* dan *recheck* pada hasil kategorisasi antarinforman pokok maupun tambahan. Peneliti juga melakukan *check* dan *recheck* dengan hasil data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dari dokumentasi yang ada.

#### 7. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan terakhir diambil ketika sudah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh (*saturated*) dengan mengulangi langkah satu sampai langkah enam dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).





Tabel 3.1 Proses Analisis Data (Diolah Februari 2016)

### 3.6 Metode Pengukuran Keabsahan Data

Peneliti mengecek keabsahan atau validitas data menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton dalam Moleong (2012:330) teknik triangulasi data dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

1. Teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui:
  - a. Perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
  - b. Perbandingan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang diucapkan secara pribadi.
  - c. Perbandingan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
  - d. Perbandingan keadaan dan perspektif seseorang berpendapat sebagai rakyat biasa, dengan yang berpendidikan dan pejabat pemerintah.
  - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.
2. Pada triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa

teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode sama.

3. Triangulasi dengan menggunakan teori dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*) dalam hal ini, jika analisa telah menggunakan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisa maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan atau penyaing.

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam suatu kontek studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sumber, metode dan teori. Triangulasi sumber data artinya peneliti memadukan antara hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Triangulasi metode peneliti menggunakan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Sedangkan triangulasi teori akan digunakan dalam bab empat untuk menganalisis hasil temuan lapangan yaitu dengan memadukan hasil penelitian dengan teori yang dipergunakan dalam bab dua.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi serta observasi dan survei lapang, diketahui Pekerjaan Sektor Informal sebagai Usaha Kesejahteraan Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun , maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Perubahan kondisi yang terjadi kepada Pensiunan di Kabupaten Madiun yang semulanya mereka memiliki kehidupan yang tercukupi karena gajinya juga mendukung, menjadi tidak tercukupi karena jumlah tunjangan yang berkurang setengah dari gaji awal. Atas dasar itulah, karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, diperlukan kembali pekerjaan yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. salah satu pekerjaan yang bisa dimasuki oleh pensiunan adalah pekerjaan informal karena mudah untuk dimasuki oleh pihak manapun. Adapaun yang dicapai dari usaha mereka dengan menggunakan pekerjaan informal adalah

- a. Proses Pekerjaan Informal

Berjalannya pekerjaan informal dimulai dari permasalahan PNS ketika memasuki masa pensiun sampai saat ini sehingga usaha yang dilakukan ini benar-benar dibutuhkan pensiunan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu permasalahan ekonomi dan permasalahan sosial. Permasalah ekonomi lebih mengarah kedalam kebutuhan pensiunan PNS untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan sosial lebih menekankan kepada kembalinya pensiunan PNS tersebut kedalam kegiatan bermasyarakat dan pengaruh yang diciptakan dari pekerjaan informal tersebut.

b. Jenis Pekerjaan Informal Pensiunan PNS

Pekerjaan sektor informal yang dilakukan oleh pensiunan PNS di Kabupaten Madiun antara lain sebagai guru privat, jasa becak cinta, jasa penyewa kontrakan, peternak, petani, penjual alat-alat pertanian (saprotan), membuka usaha toko kelontok, pembuat sekaligus penjual gorong-gorong, jasa chattering dan penjual makanan.

c. Tingkat Pendapatan

Terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan antara pensiun tidak memiliki pekerjaan sektor informal dan hanya mengandalkan gaji pensiun. Bertambahnya penghasilan ini bisa mencapai 1.000.000-3.000.000 perbulannya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi pensiunan PNS.

2. Dampak dari pekerjaan informal yang dilakukan oleh Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun :

a. Dampak Sosial

1) Berubahnya Status Sosial Pensiunan PNS

Perubahan terjadi ketika jabatan mereka harus dilepas dan diharuskan untuk pensiun sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Hal ini tentunya menyebabkan pensiunan tersebut beralih kondisi dari individu yang memiliki pekerjaan, menjadi seorang individu yang pengangguran dan perbulannya hanya mengandalkan uang pensiun. Untuk merubah status tersebut, pensiunan sekarang melakukan pekerjaan informal supaya tidak menjadi individu yang menganggur. Fungsi kesejahteraan yang berjalan dalam aspek ini adalah fungsi pemulihan dan pengembangan. Fungsi Pemulihan yaitu adanya perubahan status dari pensiunan yang identik dengan pengangguran menjadi seorang pensiunan yang memiliki pekerjaan informal. Fungsi

Pengembangan ditekankan kepada status mereka saat ini sebagai pekerja sektor informal sehingga dapat meningkatkan kemampuan pensiunan tersebut.

## 2) Kembalinya Kepercayaan Diri Pensiunan PNS

Kembalinya kepercayaan pensiunan PNS terhadap masyarakat dan keluarganya. Perubahan status dari PNS ke pensiun, menyebabkan pensiun hilang kepercayaan diri untuk kembali lagi kemasyarakat. sehingga dia memunculkan pekerjaan baru yang bisa mengembalikan fungsinya di dalam masyarakat. Kepercayaan diri pensiun sudah kembali karena saat ini mereka mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan masyarakat. Fungsi yang ditimbulkan dari dampak ini adalah fungsi pemulihan, pencegahan dan pengembangan. Pemulihan digunakan sebai perbaikan kondisi kepercayaan diri pensiunan yang menurun. Pencegahan digunakan sebagai salah satu solusi agar tidak semakin terpuruknya keadaan pensiun dan fungsi pengembangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan pensiunan untuk mengembangkan diri untuk lebih berperan aktif di dalam masyarakat.

## 3) Terbentuknya Jaringan Sosial Baru Antara Pensiunan

Pengembangan jaringan yang dilakukan oleh pensiunan PNS disini lebih menekankan kepada proses dalam melakukan pekerjaan informal dengan inovasi-inovasi baru dan kualitas yang tentunya berbeda dengan apa yang selama ini orang buat. Sehingga teman-teman seperjuangan yang membutuhkan bisa menggunakan pekerjaan informal yang dilakukan oleh pensiunan PNS. Mereka memanfaatkan jaringan-jaringan seperti arisan, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan kelompok sehingga bisa memperluas usahanya. Fungsi penunjang (*suportif*) terdapat juga fungsi pengembangan dan

pengecahan (*preventif*). Fungsi penunjang lebih ditekankan kepada terbentuknya arisan pensiunan, sehingga membantu kelancara pekerjaan pensiunan PNS. Pengembangan disini pensiunan tidak hanya mengandalkan kelompok tersebut, tetapi mereka menggunakan kelompok-kelompok lain sekiranya bisa dimasuki oleh pensiunan dan fungsi pencegahan ini ada ketika pensiunan mempertahankan jaringan yang telah dibentuk.

b. Dampak Ekonomi

1) Tercukupinya Kebutuhan Keluarga

Pekerjaan baru yang dilakukan oleh pensiunan di sektor informal membawa dampak yang baik untuk kebutuhan dasar keluarga pensiun. Kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup pensiun, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu (makan dan minum, papan, serta pakaian) maupun keperluan pelayanan sosial (air, minum, sanitasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan). Terpenuhiya kebutuhan ekonomi ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh pensiunan saat ini karena hasil dari pekerjaan itu dapat mencukupi semua kekurangan ekonomi yang menjadi permasalahan pensiun. Tercukupinya kebutuhan keluarga dapat meningkatkan fungsi pemulihan dan penunjang. Fungsi pemulihan merupakan berhasilnya pensiunan merubah kondisi ekonomi dari kekurangan menjadi tercukupi sedangkan Fungsi penunjang ini terdapat di dalam gaji pensiunan perbulannya yang digunakan sebagai modal dalam pekerjaan informal sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

2) Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Pensiunan PNS memang memiliki keterbatasan tetapi karena itu muncul pekerjaan baru yang dapat membantu mengatasi

pengangguran di sekitar lingkungan dimana dia tinggal. Permasalahan negara berupa pengangguran sedikit terbantu dengan pekerjaan informal yang dibentuk oleh pensiunan disini. Lapangan pekerjaan yang diciptakan pensiun bisa merubah kondisi sosial dari pengangguran di sekitar mereka selain sisi ekonomi yang berubah. Hal ini terlihat dari usaha kesejahteraan yang dilakukan oleh pensiunan digunakan untuk merubah keadaan dan pandangan masyarakat yang tinggal di sekitar pensiun tersebut tinggal salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan pengangguran untuk bekerja di dalam pekerjaan informal yang dilakukan serta sebisa mungkin pekerjaan itu dapat bermanfaat terhadap masyarakat. Fungsi kesejahteraan berupa fungsi pengembangan dan penunjang dapat meningkat dalam dampak ini. Fungsi penunjang yang ada dalam dampak ini adalah berkurangnya jumlah pengangguran yang ada pada lingkungan dimana pensiunan itu tinggal, sedangkan penunjang lebih kepada ringannya pekerjaan yang dilakukan oleh pensiunan karena adanya tenaga kerja yang membantu.

### 3) Adanya Cadangan Dana (Tabungan) Pensiun

Pada saat ini dana tabungan dapat digunakan untuk menghalangi keadaan ekonomi yang lebih buruk. Adanya uang tabungan ini diperoleh dari pekerjaan sektor informal pensiunan PNS. Selain digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, hasil dari pekerjaan informal ini juga bisa menambah tabungan dari pensiunan PNS tersebut. Usaha untuk mendapatkan pekerjaan baru digunakan tidak hanya sebagai pencitraan atau pemulihan status, tetapi digunakan untuk mencegah kebutuhan-kebutuhan yang muncul tidak terduga. Ada 3 fungsi kesejahteraan dalam dampak ini yaitu pencegahan, pengembangan dan penunjang. Fungsi pencegahan lebih ditekankan

kepada pensiunan yang merefleksikan bahwa pensiunan masih bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan antisipasi masa depan yang dapat menciptakan rasa aman di dalam diri pensiun. Fungsi Pengembangan disini yaitu untuk dapat meningkatkan fungsionalitasnya di dalam masyarakat. Sedangkan fungsi penunjang meningkat karena adanya peran keluarga untuk meminimalisir pengeluaran.

Peningkatan Kesejahteraan karena pekerjaan informal oleh pensiunan PNS ini berdampak cukup besar bagi pensiun dan keluarganya atau bahkan lingkungan dimana pensiun tersebut tinggal. Berikut merupakan dampak yang didapatkan dari pekerjaan informal yang dijalankan oleh pensiunan. Pekerjaan sektor informal yang telah dilakukan oleh pensiunan PNS sebagai peningkatan kesejahteraan pensiunan PNS di Kabupaten Madiun dari tahun 2014 sampai saat ini telah mampu mengubah tingkat kesejahteraan keluarga pensiun tersebut. Usaha tersebut juga mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar tempat pensiunan tersebut tinggal berupa terbukanya lapangan pekerjaan untuk orang yang tinggal di daerah tersebut. Selain hal tersebut dampak yang dihasilkan dapat mengembalikan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang telah menurun yaitu fungsi penyembuhan (*rehabilitatif*), pencegahan (*preventif*), pengembangan (*development*), penunjang (*supportif*). Pekerjaan informal tersebut, ternyata mampu memberi dampak perubahan bagi kesejahteraan pensiunan dan masyarakat di Kabupaten Madiun.

## 5.2 Saran

Melihat dari kesimpulan diatas, saran yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Menghadapi persoalan peningkatan kesejahteraan, pensiunan PNS dapat mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pensiunan. Sehingga mampu memperluas pekerjaan yang dilakukan saat ini.

2. Pensiunan PNS dirasa perlu untuk memikirkan dampak lain akibat berjalannya pekerjaan informal keluar dari Aspek pemulihan, pencegahan, pengembangan dan penunjang.
3. PNS yang hendak memasuki masa pensiun, harus memikirkan bagaimana kehidupan ketika memasuki masa pensiun. Persiapan dana pensiun sudah harus dimulai begitu seseorang mulai bekerja. menggunakan strategi kebutuhan hidup yaitu *success, trouble, roulette* sehingga kedepannya bisa menghadapi masa pensiun dengan penuh persiapan.
4. Diharapkan kepada pemerintahan ataupun instansi terkait untuk lebih mengoptimalkan perencanaan PNS dalam memasuki masa pensiun, sehingga ketika proses pensiun berlangsung mereka dapat mempunyai tambahan penghasilan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan Meningkatkan kemampuan calon pensiunan, seperti peningkatan kemampuan berwirausaha melalui pelatihan sebelum pensiun, Sehingga kesejahteraan pensiunan dapat tercapai.
5. Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang berbeda.



# **LAMPIRAN**

Lampiran 1

**GUIDE INTERVIEW INFORMAN POKOK**

**Dampak Sosial Ekonomi dari Pekerjaan Sektor Informal yang Dilakukan Oleh  
Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun**

Tanggal/waktu :

Tempat :

Tujuan :

**Identitas Informan**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Status :

Alamat :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

**Untuk Pensiunan PNS yang Melakukan Pekerjaan Sektor Informal**

**Guide Interview**

1. Bagaimana gambaran awal bapak mengenai pensiunan ?
2. Sekarang bapak sudah menjadi seorang pensiunan, bagaimana keadaan atau perbedaan ketika pensiun dan sesudah pensiun?
3. Dari perbedaan tersebut, apakah ditemukan permasalahan ?
4. Permasalahan apa yang paling mendasar ketika bapak memasuki masa pensiun ?

5. Sebagai kepala keluarga, apakah ada anak yang masih harus dibiayai ketika bapak memasuki masa pensiun ?
6. Apakah gaji atau tunjangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penghargaan ketika mengabdikan, dapat mencukupi kebutuhan yang ada ?
7. Setelah tidak aktif bekerja atau memasuki masa pensiun tentunya bapak tidak bisa memasuki dunia formal atau kembali lagi bekerja di dunia pemerintahan, salah satu usaha atau pekerjaan yang dilakukan adalah sektor informal. Pekerjaan apa yang dilakukan bapak ketika pensiun?
8. Apakah perbedaan dari pekerjaan sebelum dan ketika pensiun?
9. Bagaimana tanggapan keluarga mengenai pekerjaan yang anda lakukan ?
10. Dari pekerjaan tersebut, apakah kebutuhan keluarga dapat dipenuhi ?
11. Apa tujuan dilakukannya pekerjaan tersebut, mengingat tunjangan yang diberikan sudah cukup besar?
12. Ketika pekerjaan tersebut berjalan apakah tujuan kesejahteraan dapat tercapai atau meningkat ?

**GUIDE INTERVIEW INFORMAN TAMBAHAN**

**Dampak Sosial Ekonomi dari Pekerjaan Sektor Informal yang Dilakukan Oleh  
Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun**

Tanggal/waktu :

Tempat :

Tujuan :

**Identitas Informan**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Status :

Alamat :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

**A. Untuk Keluarga Pensiunan PNS sebagai penerima manfaat langsung (*share benefits*)**

1. Apa yang anda ketahui terkait dengan pekerjaan Informal yang pensiun lakukan ?
2. Bagaimana pensiun tersebut melakukan pekerjaan tersebut ?
3. Apakah ada dampak yang secara langsung dapat didapatkan oleh anggota keluarga ?
4. Apakah keluarga mendukung terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pensiunan ?

**B. Untuk Pekerja dari Pekerjaan Informal pensiunan PNS sebagai pihak yang terlibat dalam Pekerjaan tersebut**

1. Sudah lama Bapak jualan di sini? Dulu Bapak kerja apa?
2. Bapak sebagai pekerja disini ya? Bagaimana untuk gaji Bapak sendiri berapa ? apakah bisa dibilang cukup ?
3. Bagaimana perilaku pensiunan terhadap pegawainya ?
4. Bagaimana pensiunan melakukan pekerjaan tersebut ?

**C. Untuk Pekerja dari Pekerjaan Informal pensiunan PNS sebagai pihak yang terlibat dalam Pekerjaan tersebut**

1. Bagaimana gambaran awal bapak mengenai pensiunan ?
2. Sekarang bapak sudah menjadi seorang pensiunan, bagaimana keadaan atau perbedaan ketika pensiun dan sesudah pensiun?
3. Dari perbedaan tersebut, apakah ditemukan permasalahan ?
4. Permasalahan apa yang paling mendasar ketika bapak memasuki masa pensiun ?
5. Sebagai kepala keluarga, apakah ada anak yang masih harus dibiayai ketika bapak memasuki masa pensiun ?
6. Apakah gaji atau tunjangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penghargaan ketika mengabdikan, dapat mencukupi kebutuhan yang ada ?
7. Setelah tidak aktif bekerja atau memasuki masa pensiun tentunya bapak tidak bisa memasuki dunia formal atau kembali lagi bekerja di dunia pemerintahan, salah satu usaha atau pekerjaan yang dilakukan adalah sektor informal. Pekerjaan apa yang dilakukan bapak ketika pensiun?